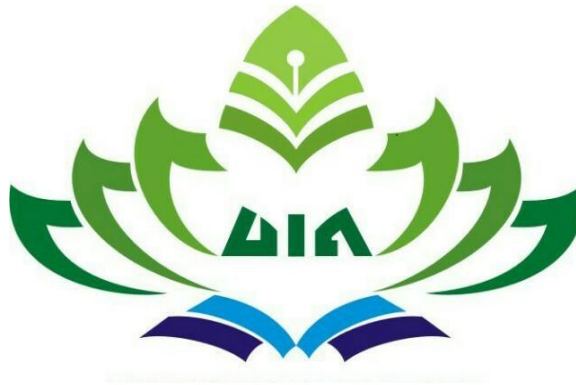


**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi pada peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi Islam**

Oleh

**KARTIAWATI
NPM : 1351010145
Jurusan : Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

**ANALISIS EFEKTIFITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



Pembimbing I : H. Supaijo, S.H., M.H

Pembimbing II : Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1439 H / 2017 M

ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang selalu dialami oleh negara berkembang adalah masalah kemiskinan, tidak terkecuali negara Indonesia. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia telah menjadi prioritas disetiap era pemerintahan dengan berbagai program pengentasan kemiskinan yang digulirkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pada tahun 2007 pemerintah telah menggulirkan program bantuan tunai bersyarat yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan serta mendukung dalam upaya mempercepat target *Millennium Development Goals* (MGDs).

Permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam skripsi ini adalah apakah yang dimaksud dengan PKH, bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan dan bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) menurut perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Bonglai Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan serta untuk mengetahui bagaimana PKH dalam perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan penyebaran angket. Dalam menentukan populasi dan sample digunakan metode *purposive sampling* dari 145 peserta PKH yang menjadi populasi, diambil 70 peserta PKH untuk dijadikan sample, dengan memilih responden pada tahap I. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan analisis deskriptif dari data-data yang dikumpulkan oleh peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, efektivitas PKH yang diukur melalui lima indikator yaitu : masukan, proses, keluaran, manfaat dan dampak. Ada dua indikator yang tidak terpenuhi oleh PKH di Kampung Bonglai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: tidak tepatnya penentuan RTM penerima bantuan oleh pihak pengelola serta tidak tepatnya penerima bantuan dalam mengelola/mengalokasikan dana PKH yang diterima. Sehingga PKH yang sudah berjalan selama empat tahun di Kampung Bonglai masih kurang efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Kampung Bonglai karena masih banyak penduduk miskin yang belum tercover oleh PKH. Dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung jawab dan *takaful*, dalam implementasinya PKH baru hanya sebatas bentuk jaminan sosial pemerintah kepada masyarakat sedangkan nilai keadilan dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan sehingga program PKH dapat terlaksana secara efektif.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tepl. (0721) 703289

PERSETUJUAN


Nama Mahasiswa : **Kartiawati**
NPM : **1351010145**
Program Studi : **Ekonomi Syari'ah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Judul : **Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengentaskan Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada peserta PKH Kampung Banglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)**

MENYETUJUI


Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 15 November 2017

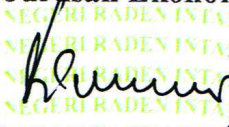
Pembimbing I


H. Supaijo, S.H., M.H.
NIP.196503141994031002

Pembimbing II


Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy.
NIP.-

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Islam


Madnasir, S.E., M.S.I.
NIP.197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. Endro Suratmin Sukaramo Bandar Lampung Tepl. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)

dalam Mengentaskan Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

(studi pada peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan);

disusun oleh Kartiawati NPM 1351010145 Program Studi Ekonomi Syari’ah,

telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada

hari Rabu, 15 November 2017.

TIM/DEWAN PENGUJI :

Ketua : Madnasir, S.E., M.S.I

Sekretaris : Yulistia Devi, M.S.Ak

Penguji I : Syamsul Hilal, M.Ag.

Penguji II : H. Supaijo, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. Moh. Bahrudin, M.A.
NIP.195808241989031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kartiawati

NPM : 1351010145

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengentaskan Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi karya tulis ini benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan plagiat atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam tradisi keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menerima tindakan/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran atas etika akademik dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, Nopember 2017

KARTIAWATI
NPM. 1351010145

MOTTO

وَعَاءَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿١﴾

Artinya : *Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Diponogoro, 2011) hlm.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam atas karunia dan barokahnya sehingga saya bisa menyelesaikan karya tulis ini. Sebagai tanda bakti cinta yang tulus kupersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Ayahanda dan ibunda tercinta, Karsa dan Raminah yang telah mencurahkan kasih sayang, mendidik, membimbing, mengarahkan dan senantiasa mendo'akan ananda sejak kecil hingga dewasa. Peneliti berharap semoga skripsi ini merupakan salah satu hadiah terindah bagi beliau.
2. Adikku tersayang Syamsul Rahman dan seluruh keluarga besar (kakek, nenek, paman, bibi, sepupu) yang tiadanya hentinya memberi semangat sepanjang penelitian ini dilaksanakan.
3. Teman-teman seperjuangan peneliti angkatan 2013 dari jurusan Ekonomi Islam terutama (Yunan, Topik, Agus, Ahmad, Ela, Ida, Nita, Rofi'ah) yang menemani dan memberi support serta tidak pernah bosan memberi saran kepada peneliti.
4. Teman tebaikku yang tak hentinya memberi semangat Risma Wahyu Lestari (umi) dan Wida (ndut), tim pejuang 45 Hani Handini dan Deswandi yang selalu setia menemani, menyemangati sampai saat ini.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Kartiawati, lahir di Kampung Bonglai, 01 Oktober 1996. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Karsa dan Ibu Raminah. Riwayat pendidikan penulis yang telah terselesaikan adalah:

1. SD N 3 Bonglai
2. SMP Nurul Islam Bandar Lampung
3. SMA Nurul Islam Bandar Lampung
4. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan sekolah tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim..

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat-NYA sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari nilai kesempurnaan serta tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M. Ag. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswanya untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai islami.
2. Dr. Moh. Bahrudin, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Madnasir, S.E., M.S.i selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Raden Intan Lampung yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswanya.
4. Bapak H. Supaijo, S.H.,M.H dan Ibu Okta Supriyaningsih S.E.,M.E.Sy dimana masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah

banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

5. Bapak Meji Satria selaku pendamping PKH dan Bapak Yos Sudarso selaku kepala Kampung Bonglai beserta seluruh anggotanya yang bersedia memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh peserta PKH yang bersedia menjadi responden dalam penelitian dan memberikan data-data dalam penelitian ini.
7. Ayah dan ibu beserta adikku yang selalu mendo'akanku dan menjadi penyemangat hidup selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang khasanah Ekonomi Islam.

Bandar Lampung, 15 November 2017

Penulis

KARTIAWATI
NPM.1351010145

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	16
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
F. Metode Penelitian	17
G. Penelitian Terdahulu	26
 BAB II LANDASAN TEORI	 28
A. Konsep Kemiskinan	28
1. Pengertian Kemiskinan Secara Umum.....	28
2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan	31
3. Program Pengentasan Kemiskinan.....	33

4. Pengertian Kemiskinan dalam Konteks Ekonomi Islam.....	35
5. Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam	38
B. Konsep Kesejahteraan Masyarakat	42
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat.....	42
2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat	43
3. Pengertian Kesejahteraan (Falah) dalam Ekonomi Islam.....	47
4. Indikator Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam	49
C. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)	51
1. Pengertian Efektivitas	51
2. Ukuran Efektivitas Program Keluarga Harapan	52
C. Program Keluarga Harapan (PKH)	54
1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH).....	54
2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).....	55
3. Hak dan Kewajiban Peserta (PKH)	55
4. Besaran Bantuan	59
5. Mekanisme Penerimaan (PKH)	62
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	64
1. Gambaran Umum Kampung Bonglai	64
a. Ruang Lingkup Keadaan Kampung Bonglai	65
b. Arah Kebijakan Pengembangan.....	65
2. Kondisi Masyarakat Kampung Bonglai	65
a. Tingkat Kebutuhan Dasar	66
b. Tingkat Kehidupan	69
B. Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Bonglai	69
1. Sejarah PKH di Kampung Bonglai	69
2. Implementasi PKH di Kampung Bonglai.....	72
3. Karakteristik Responden	74

4. Hasil Jawaban kuesioner Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kampung Bonglai	76
BAB IV ANALISIS DATA.....	88
A. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kampung Bonglai	88
B. Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Ekonomi Islam	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Jumlah Penduduk miskin di Indonesia 2010-2016	8
Tabel 1.2 Penduduk Desa Bonglai Menurut Tingkat pendidikan	13
Tabel 1.3 Jumlah Peserta PKH Kampung Bonglai	20
Tabel 2.1 Besaran Bantuan Komponen PKH.....	60
Tabel 3.1 Pola Konsumsi Masyarakat Kampung Bonglai	66
Tabel 3.2 Jumlah Prasarana Kesehatan di Kampung Bonglai	67
Tabel 3.3 Pendapatan Rata-rata Masyarakat Kampung Bonglai	68
Tabel 3.4 Sarana Pendidikan Di Kampung Bonglai	69
Tabel 3.5 Jumlah Penerima PKH Kampung Bonglai	71
Tabel 3.6 Usia responden.....	74
Tabel 3.7 Jenis Pekerjaan.....	75
Tabel 3.8 Tingkat Pendidikan Responden.....	76
Tabel 3.9 Hasil Sebaran Kuesioner.....	77
Tabel 3.10 Hasil Sebaran Kuesioner.....	77
Tabel 3.11 Hasil Sebaran Kuesioner	78
Tabel 3.12 Hasil Sebaran Kuesioner.....	78
Tabel 3.13 Hasil Sebaran Kuesioner.....	79
Tabel 3.14 Hasil Sebaran Kuesioner.....	79
Tabel 3.15 Hasil Sebaran Kuesioner.....	80
Tabel 3.16 Hasil Sebaran Kuesioner.....	80

Tabel 3.17 Hasil Sebaran Kuesioner	81
Tabel 3.18 Hasil Sebaran Kuesioner	81
Tabel 3.19 Hasil Sebaran Kuesioner	82
Tabel 3.20 Hasil Sebaran Kuesioner	82
Tabel 3.21 Hasil Sebaran Kuesioner	83
Tabel 3.22 Hasil Sebaran Kuesioner	83
Tabel 3.23 Hasil Sebaran Kuesioner	84
Tabel 3.24 Hasil Sebaran Kuesioner	84
Tabel 3.25 Hasil Sebaran Kuesioner	85
Tabel 3.26 Hasil Sebaran Kuesioner	85
Tabel 3.27 Hasil Sebaran Kuesioner	86
Tabel 3.28 Hasil Sebaran Kuesioner	87
Tabel 3. 29 Hasil Sebaran Kuesioner	87
Tabel 4.1 Pola Konsumsi Masyarakat Kampung Bonglai	89
Tabel 4.2 Peserta PKH Yang Tidak Termasuk Miskin	92
Tabel 4.3 Jumlah Penerima PKH Kampung Bonglai	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Penerima Bantuan PKH di Provinsi Lampung	12
Gambar 2.1 Skema Proses Utama Pelaksanaan PKH	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya penegasan arti dan makna dari istilah-istilah yang terkait dalam skripsi ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah **“Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Study pada Peserta PKH Kampung Bonglai Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”** maka perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah pada judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis merupakan proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya, atau penyelidikan dari suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya.¹

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 58

2. Efektivitas berasal dari kata bahasa inggris yakni *Effective* yang berarti tercapainya suatu pekerjaan dan perbuatan yang direncanakan.² Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan, efektivitas disebut efektif apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai *Conditional Cash Transfer (CCT)* atau program bantuan bersyarat.³
4. Pengentasan adalah mengangkat keatas, yaitu membawa kearah yang lebih baik.⁴ PKH merupakan salah satu program bantuan sosial pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.
5. Kemiskinan berasal dari kata miskin yang artinya keadaan masyarakat yang hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok saja.⁵
6. Pengentasan kemiskinan adalah upaya membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar.
7. Perspektif adalah pandangan atau sudut pandang.⁶

² *Ibid.* hlm., 352

³ TNP2K, "Program Keluarga Harapan" (On-line) tersedia di: <http://www.tnp2k.go.id> (diakses 30 November 2016)

⁴ Depatemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesi Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramdia Pustaka, 2008), hlm.401

⁵ *Ibid.*, hlm. 986

8. Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang di ambil dari AL-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.⁷

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul ini adalah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diupayakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kampung Bonglai Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

B. Alasan Memilih judul

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan obyektif

Mengingat bahwa kemiskinan merupakan masalah sosial mendasar yang dihadapi oleh setiap bangsa Indonesia, sehingga pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan atau program pengentasan kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan bentuk perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang merupakan sarana penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah diadakan observasi *prasurvey* pada Kampung Bonglai, banyaknya masyarakat penerima PKH atau rumah tangga sangat miskin yang belum mengetahui manfaat dan

⁶ *Ibid.*, hlm. 1062

⁷ Lukman Hakim, *Prinsip – prinsip Ekonmi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm.10

tujuan program PKH, sehingga terjadi kesenjangan pada implementasi program PKH.

2. Alasan Subyektif

Dari aspek yang akan dibahas, permasalahan tersebut sangat memungkinkan diadakan penelitian dan penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang implementasi program keluarga harapan (PKH) terhadap pengentasan kemiskinan, mengingat literatur dan sumber informasi dalam penulisan ini cukup tersedia. Penelitian ini sesuai dengan disiplin keilmuan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Serta didukung oleh lokasi penelitian yang terjangkau sehingga memudahkan dalam penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah suatu keadaan yang bersifat multidimensi dan sulit didefinisikan dalam definisi tunggal. Banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu telah mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan, namun belum ada yang menyepakati konsep kemiskinan dalam definisi yang disepakati bersama. Perspektif yang digunakanpun beragam mulai dari perspektif ekonomi, sosiologi, hingga perspektif moralitas.⁸ Konsep kemiskinan secara umum mendefinisikan bahwa kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau sekelompok orang dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk

⁸ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pemanfaatan, Edisi 5*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015) hlm. 299

memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual.⁹ Definisi ini memfokuskan kemiskinan pada ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Islam memandang kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha.¹⁰ Kemiskinan kultural ini membahayakan ahlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islampun menanggapi kemiskinan sebagai musibah dan bencana yang harus memohon perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya. Jika kemiskinan itu semakin merajalela, maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa kepada Allah dan juga rasa sosialnya terhadap sesama. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Qs. Al-baqarah ayat 268:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: *Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan*

⁹ Aain Mahaeni, et. al. *Evaluasi Program-Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali*, Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Vol. X No. 1:8-18 (4 Juli 2014)

¹⁰ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, Edisi Revisi, (Jakarta :PT Grafindo Persada, 2016) hlm. 70

*untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.*¹¹

Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini menjelaskan Ibnu Abi hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ia menceritakan, Rasulullah SAW pernah bersabda : “Sesungguhnya syaitan itu mempunyai dorongan atau bisikan kepada anak adam, dan malaikat juga mempunyai dorongan atau bisikan pula. Dorongan syaitan itu berupa upayanya mengembalikan kepada kejahatan dan mendustakan kebenaran. Sedangkan dorongan malaikat berupa upaya mengembalikan kepada kebaikan dan membenaran terhadap kebenaran. Barangsiapa mendapat hal tersebut, maka hendaklah ia mengetahui bahwa yang demikian itu dari Allah, dan hendaklah ia memanjatkan pujian kepada-Nya. Dan barangsiapa mendapat selain dari itu, maka hendaklah ia berlindung dari syaitan.”¹²

Islam sangat memperhatikan ekonomi yang merupakan pondasi kehidupan dalam keluarga dan Islam mengarahkan pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan pada seluruh ciptaan-Nya. Untuk terlepas dari perangkap kemiskinan, sesungguhnya Allah SWT menganjurkan umatnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya sehingga ia mampu mencapai kesejahteraan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.s Al-Qashas ayat 73:

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponogoro, 2011) hlm. 45

¹² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2004) hlm.533

وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : *Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.*¹³

Dalam tafsir *Ibnu Katsir* dijelaskan (وَالنَّهَارَ اللَّيْلَ لَكُمْ جَعَلَ) dan karena rahmat-Nya (kepada kalian) Dia jadikan untukmu malam dan siang. Artinya, Dia menciptakan siang dan malam hari. (لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya. “Yakni pada siang hari dengan melakukan perjalanan, bepergian, dan melakukan aktivitas serta kesibukan. Ungkapan ini menurut istilah ilmu balagh dinamakan *Al laf’* dan *nasyr*.¹⁴

Dalam Islam sangat jelas bahwa adanya kewajiban pada setiap individu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan yaitu dengan bekerja, selain dari pada kewajiban individu terdapat pula kewajiban orang lain, keluarga atau masyarakat dan kewajiban pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Kewajiban orang lain tercermin pada jaminan terhadap keluarga, dan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah. Kewajiban pemerintah tercermin pada kewajiban mencukupi kebutuhan setiap warga negara melalui sumber dana yang sah.

¹³ *Ibid.* hlm. 394

¹⁴ Al Imam Abdul Fida Isma’il Ibnu Katsir Ad-Dimasyaqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, hlm.23

Perkembangan kemiskinan di Indonesia jika dilihat dari data BPS, beberapa tahun terakhir ini angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Persentase Penduduk Miskin (persen)
2012	245,4	28,71	11,66
2013	248,8	28,60	11,46
2014	252,2	27,73	10,96
2015	255,5	28,51	11,13
2016	258,7	27,76	10,70

Sumber: Diolah dari data survei sosial ekonomi nasional (Susenas)¹⁵

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 penduduk miskin mencapai 28,71 juta penduduk atau 11,66 persen , pada tahun 2013 mengalami penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 28,60 juta penduduk atau 11,46 persen, pada tahun 2014 menurun menjadi 27,73 juta penduduk miskin atau 10,96 persen, pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin kembali meningkat hal ini disebabkan karena harga barang dan kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Mulai tahun 2015 hingga Maret 2016 tercatat baik jumlah maupun persentase penduduk miskin mengalami penurunan kembali.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm.1

¹⁶ Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2016*, (On-line) tersedia di: https://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20160718115446.pdf, (diakses pada, Minggu, 26 Maret 2017)

Penurunan tingkat kemiskinan seperti yang telah disebutkan diatas dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: tingkat inflasi yang relatif rendah, nominal rata-rata upah buruh tani pada Maret 2016 mengalami kenaikan, rata-rata tingkat pengangguran terbuka menurun. Perubahan tingkat kemiskinan yang disebabkan oleh beberapa faktor tersebut merupakan hasil dari upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah melalui kebijakan pemberian perlindungan sosial kepada masyarakat miskin juga merupakan salah satu faktor yang ikut andil dalam menurunnya tingkat kemiskinan di Indonesia.

Di Indonesia kewajiban pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tersurat dalam dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 serta Pasal 34 ayat 2 menjelaskan tentang jaminan sosial kepada masyarakat dan pasal 34 ayat 3 menjelaskan pemerintah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum.¹⁷ Pada pasal-pasal tersebut diatas menjelaskan akan hak-hak setiap warga negara dan bagaimana kewajiban negara terhadap masyarakatnya.

Permasalahan kemiskinan sangatlah memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh untuk menghindari kemungkinan merosotnya mutu generasi (*lost generation*) di masa mendatang. Dalam upaya mengurangi kemiskinan juga perlu dilakukan pendekatan kemanusiaan yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar, pendekatan kesejahteraan melalui peningkatan dan

¹⁷ UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) Parkir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat (2) negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

pengembangan usaha ekonomi produktif, serta penyediaan jaminan dan perlindungan sosial. Pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu yang melibatkan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat miskin sendiri agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pemerintah dalam usahanya menurunkan tingginya angka kemiskinan yaitu dengan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, melalui program pengentasan kemiskinan seperti diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial (JAMKESMAS, RASKIN, BSM, PKH), program berbasis pemberdayaan masyarakat (PNPM), pemberdayaan usaha mikro (KUR), program-program ini berdasarkan pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menentukan bahwa: “perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”.¹⁸

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH tidak sama dengan bantuan langsung tunai sebelumnya dan bukan merupakan program lanjutan dari program-program sebelumnya yang membantu

¹⁸ Kementrian Sosial, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*, (On-line) tersedia di <https://www.kemsos.go.id/unduh/UU-kesos-No112009.pdf> (diakses, 7 Maret 2017)

mempertahankan daya beli rumah tangga miskin pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan.¹⁹

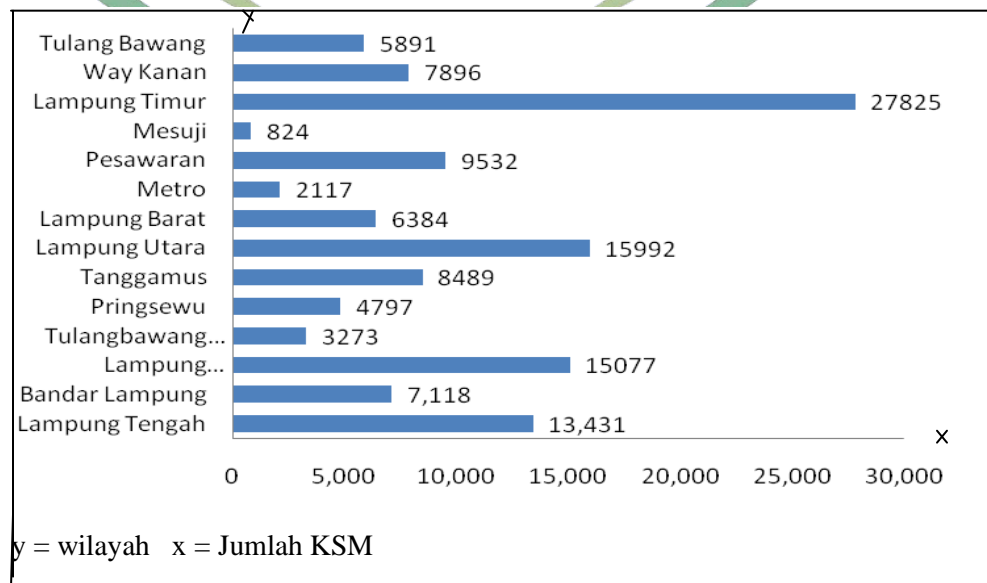
Tujuan diberlakukannya PKH dalam jangka panjang adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok miskin. Tujuan tersebut sekaligus mendukung dalam upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MGDs). Ada lima komponen MGDs yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu mencakup: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, Pendidikan dasar, Kesenjangan gender, Pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan Pengurangan kematian ibu melahirkan. Secara khusus, tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, meningkatkan status kesehatan dan

¹⁹ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Panduan Pemantuan Program Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: TNP2K, 2012), hlm. 19

gizi ibu hamil/nifas dan balita dibawah lima tahun, anak pra sekolah RTM atau peserta PKH.

PKH dialokasikan ke daerah-daerah yang memenuhi syarat yang telah ditentukan, sampai dengan tahun 2014 PKH telah mencakup pada 33 provinsi, 336 kabupaten/kota, 3.429 kecamatan, dengan total penerima 2,7 juta KSM.²⁰ Implementasi PKH diprovinsi Lampung dilaksanakan sejak November 2010 pada empat kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Tulang Bawang Barat. Sampai dengan tahun 2014, pengembangan PKH telah mencapai 15 Kabupaten/Kota di Lampung. Hal tersebut seperti ditunjukkan pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Grafik Penerima Bantuan PKH di Provinsi Lampung



Sumber: Data UPPKH Provinsi Lampung 2014

²⁰ Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Kedepan*, (Bandung: Fokus Media, 2012) hlm. 134

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa pemberian manfaat program PKH telah mencakup keseluruhan Kabupaten di Provinsi Lampung dengan total penerima bantuan 128.646 KSM pada tahun 2014, termasuk didalamnya Kampung Bonglai. Kampung Bonglai Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan menerima bantuan PKH sejak 2014 dengan penerima manfaat sebanyak 145 peserta. Dari data yang diperoleh, jumlah penduduk Kampung Bonglai terdiri dari 4.221 jiwa.²¹ Kampung Bonglai merupakan salah satu desa dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Fenomena yang tampak di Kampung Bonglai adalah tingkat IPM (indeks pembangunan manusia) rendah, kondisi ini seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Penduduk Kampung Bonglai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	-
2	Strata 1	5 orang
3	D3/Sarjana Muda	10 orang
4	D1/D2	4 orang
5	SLTA Sederajat	415 orang
6	SLTP Sederajat	500 orang
7	SD Sederajat	2.340 orang
8	Tidak Sekolah	60 orang
Jumlah		3.334 orang

Sumber: Dokumentasi Kampung Bonglai

Pada tabel diatas menunjukkan rendahnya IPM penduduk Kampung Bonglai, selain masalah pendidikan tidak jarang masyarakat yang menyepelekan masalah kesehatan dengan alasan keterbatasan ekonomi hal ini

²¹ Dokumentasi Kampung Bonglai, hlm.3

terbukti dengan adanya balita yang mengalami gizi buruk. Permasalahan pada sisi *supply* yang menyebabkan rendahnya akses RTM terhadap pendidikan dan kesehatan antara lain adalah belum tersedianya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, biaya pelayanan yang tidak terjangkau oleh RTM. PKH yang mewajibkan RTM memeriksakan kesehatan ibu hamil dan memberikan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak, termasuk menyekolahkan anak-anak, akan membawa perubahan perilaku RTM terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan. Dengan adanya PKH di Kampung Bonglai yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah dan kesehatan, diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat di Kampung Bonglai yang selama menjadi masalah terbesar bagi keluarga miskin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Azizah selaku ketua Bidang Sosial di Kampung Bonglai menyatakan bahwa :

“Jauh lebih lanjut PKH pada dasarnya bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang berupa bantuan tunai bersyarat, tetapi tidak semua penerima manfaat mengalokasikan bantuan PKH sesuai dengan aturan dan ketentuan PKH”.²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Khutbi selaku Kaur pemerintahan menyatakan bahwa:

“Status sosial masyarakat yang tidak mampu ketika pendataan pemilihan calon peserta penerima bantuan, namun pada saat pencairan dana/realisasi status peserta berubah menjadi masyarakat yang masuk dalam kategori mampu. Hal ini tentu saja menjadi masalah tersendiri bagi para

²² Wawancara Ibu Azizah, Ketua Bidang Sosial Kecamatan Banjit pada (Selasa, 27 Desember 2016 Pukul 10:00 WIB)

petugas karna petugas PKH tidak bisa mencabut kepesertaan begitu saja tanpa adanya dukungan perubahan data dari kantor pusat”.²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Juliyanah salah satu peserta PKH, menyatakan bahwa:

“kurangnya sosialisasi mendalam tentang PKH, sehingga banyak para peserta yang tidak mengerti akan maksud dan tujuan PKH, dan masih banyaknya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat PKH”.²⁴

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam program PKH masih banyak masalah dalam pelaksanaan program PKH di Kampung Bonglai, mengingat program PKH merupakan bentuk dari keseriusan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan serta implikasi positif PKH harus bisa dibuktikan secara empiris sehingga pengembangan PKH memiliki bukti nyata yang bisa dipertanggung jawabkan. Atas dasar permasalahan yang dikemukakan di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)”**.

²³ Wawancara Bapak Khutbi, Kaur Pemerintahan Kampung Bonglai (Kamis, 30 Maret 2016 Pukul 14.30 WIB)

²⁴ Wawancara Ibu Juliyanah, Peserta PKH Kampung Bonglai Kecamatan Banjit pada (Rabu, 28 Desember 2016 Pukul 15:00 WIB)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan agar penelitian ini dapat sesuai dengan tujuan yang hendak di capai maka perlu adanya rumusan yang jelas dan terarah, adapun rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah yang dimaksud dengan Program Keluarga Harapan (PKH) ?
2. Bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan?
3. Bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) menurut perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian

a. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan di Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) menurut perspektif Ekonomi Islam.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang ekonomi dan di harapkan dapat menjadi tambahan litelatur ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.

b. Bagi pemerintah Daerah

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam hal pengambilan kebijakan yang menyangkut peningkatan peran pemerintah dalam membantu mengentaskan kemiskinan yang ada dimasyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

c. Bagi masyarakat

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat bahwasanya Program Keluarga Harapan dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan.

F. Metode penelitian

Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.²⁵ Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan data dan penafsiran fakta-fakta.

²⁵ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi*, (Malang: Rineka Cipta, 2005) hlm.16

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian dalam kancan sebenarnya.²⁶ Penelitian *field research* dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian, dalam penelitian ini bersumber pada lokasi Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan yang terkait dengan demografi kependudukan yang berhak menerima bantuan PKH.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (*deskripsi*) lengkap tentang sesuatu yang sedang diteliti. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan.

²⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hlm. 96

3. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.²⁷ Informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan informan yang mewakili populasi. Informan di tentukan terlebih dahulu dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasrkan kriteria yang telah di tentukan dan menggunakan beberapa orang lain sebagai *key informan*.²⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di kumpulkan atau di peroleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data diperoleh dari kepustakaan, studi dokumentasi atau dari laporan penelitian terdahulu. Sehingga data skunder dalam penelitian ini dapat di peroleh melalui

²⁷ Kaelan, M.s, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005) hlm. 58

²⁸ *Ibid.*, hlm.60

catatan-catatan, arsip, dan dokumen-dokumen lain yang dapat di gunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.²⁹

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Kampung Bonglai memiliki 12 dusun dengan jumlah masyarakat yang menerima PKH pada tahap I Sebanyak 70 peserta, tahap II sebanyak 75 total 145 peserta yang ada di Kampung Bonglai yang menjadi populasi pada penelitian ini. Secara rinci peserta PKH Kampung Bonglai seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Jumlah Peserta PKH Kampung Bonglai

No.	NamaDusun	Peserta PKH Tahap I	Peserta PKH Tahap II
1	Dusun 1	10 Peserta	6 Peserta
2	Dusun 2	5 Peserta	6 Peserta
3	Dusun 3	8 Peserta	7 Peserta
4	Dusun 4	5 Peserta	5 Peserta
5	Dusun 5	6 Peserta	8 Peserta
6	Dusun 6	7 Peserta	7 Peserta
7	Dusun 7	5 Peserta	5 Peserta
8	Dusun 8	5 Peserta	5 Peserta
9	Dusun 9	4 Peserta	8 Peserta
10	Dusun 10	5 Peserta	6 Peserta
11	Dusun 11	5 Peserta	7 Peserta
12	Dusun 12	5 Peserta	6 Peserta
Jumlah		70	75

Sumber : Data UUPKH Kec. Banjit³¹

²⁹ Ibid., hlm.73

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013, hlm.

³¹ Dokumentasi UUPKH, Periode 2014-2016

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang di ambil dengan menggunakan cara-cara tertentu.³² Untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini maka diperlukan sampel sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih mudah dalam melaksanakan penelitian, atau dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³³ Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penentuan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan pertimbangan sebagai berikut:

1. Rumah tangga sasaran penerima manfaat PKH
2. Penerima PKH tahap I, hal ini dikarenakan penerima PKH tahap I sudah lama menerima bantuan PKH yakni sejak tahun 2014, sedangkan penerima PKH tahap II tidak bisa dijadikan sampel dikarenakan baru menjadi anggota PKH sejak tahun 2016 akhir dan baru satu kali menerima bantuan.

Dalam tahap pelaksanaan pengumpulan data, pemilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemandirian peneliti dalam memperoleh data. Namun demikian *informan* yang dipilih tersebut dapat menunjuk *informan* lain yang di anggap lebih tahu sehingga informasi dapat

³² Soeratno dan Lincollin Arsyad, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi Lima*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008) hlm.83

³³ *Ibid.*, hlm. 106

berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemandirian penelitian dalam memperoleh data hal semacam ini disebut *snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan penarikan sampel bertahap yang semakin lama jumlah *informan* semakin besar.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder dilakukan dengan suatu penelitian secara seksama, yaitu dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpulan data yang dapat dilakukan secara spontan dan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.³⁴ Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu menyajikan data secara rinci dan melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat di peroleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.

b. Interview / Wawancara

Interview adalah teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-

³⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003) hlm. 64

cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Untuk mengetahui persoalan obyek yang teliti.³⁵ Teknik wawancara yang diarahkan pada suatu masalah tertentu atau yang menjadi pusat penelitian. Ini merupakan sebuah proses untuk menggali informasi secara langsung dan mendalam sebagai data primer. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan informan yang dianggap memiliki representasi informasi yang relevan dengan penelitian.

c. Kuesioner

Metode kuesioner adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden.³⁶ Kuesioner pada penelitian ini menggunakan skala pengukuran Guttman. Skala Guttman adalah apabila peneliti ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu masalah yang ditanyakan seperti “ya” dan “tidak” . Jika capaian hasil kuesioner mencapai dibawah 50% maka objek yang diteliti kurang efektif. Jika capaian hasil kuesioner mencapai diatas 50%-100% maka dapat dikatakan objek yang diteliti mendekati efektif dan efektif. Untuk penilaian jawaban positif diberi skor 1 dan negative diberi skor 0. Dalam hal ini kuesioner ditujukan kepada peserta PKH Kampung Bonglai.

³⁵ *Ibid.*, hlm.70

³⁶ Soeratno dan Lincollin Arsyad, *Op.,Cit*, hlm. 112

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai catatan-catatan, dokumen-dokumen, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, notulen rapat atau agenda-agenda. Data-data tersebut bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu.³⁷ diharapkan mampu memperkaya teori, pendapat serta pemikiran terkait dengan efektivitas program keluarga harapan dalam pengentasan kemiskinan di tinjau dari perspektif ekonomi Islam.

6. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data yaitu dengan menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data adalah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan yaitu menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.³⁸ Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.

³⁷ Sugiyono, *Op.,Cit*, hlm.117

³⁸ Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hlm.89

2. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.
3. Rekomendasi data (*reconstructing*), yaitu menyusun data secara teratur dan berulang, sehingga mudah dipahami.
4. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³⁹

7. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya proses analisis data itu di mulai dari menelaah data secara keseluruhan yang telah tersedia dari berbagai macam sumber, baik itu pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan yang lainnya. Metode pengolahan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu proses secara sistematis mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen (pustaka) untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian⁴⁰.

Dalam penelitian ini data yang telah di dapat peneliti kemudian dianalisa dengan metode kualitatif, yaitu dengan cara menerapkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari pihak bagian sosial

³⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2004) hlm. 126

⁴⁰ Azhariah Rahman, *Analisis dan interpretasi data kualitatif serta pemeriksaan keabsahan data*, (On-Line) tersedia di: <http://www.academia.edu>, (27 Februari 2017)

Kampung Bonglai dalam hal ini peran PKH sebagai program bantuan bersyarat dalam pengentasan kemiskinan dianalisis dengan berbagai teori yang ada dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, ada 2 peneliti terdahulu yang melakukan penelitian tentang Program Keluarga Harapan (PKH), berikut penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi:

1. Slamet Riyadi (2016), dalam tesisnya yang berjudul “*Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Keluarga Sangat Miskin (KSM) Penerima Bantuan (studi di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*” mengemukakan bahwa: PKH yang mengkombinasikan skema bantuan tunai dengan prasyarat berupa komitmen kehadiran peserta PKH pada fasdik dan faskes, adanya mekanisme pendampingan yang intens oleh petugas, pertemuan kelompok KSM, menunjukkan hasil positif dibandingkan bantuan langsung tunai tanpa prasyarat.
2. Hajar Hari Antoro (2015), dalam jurnalnya yang berjudul: “*Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dibidang Pendidikan di Desa Kakap Kabupaten Kubu Raya*” mengemukakan bahwa: PKH di Desa Sungai Kakap dinilai kurang efektif, hal ini disebabkan masih sangat

tingginya jumlah anak putus sekolah dan kurangnya kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan.

Dari 2 penelitian diatas menjelaskan bahwa diberlakukannya PKH pada setiap wilayah memiliki pengaruh yang berbeda-beda, Begitupula dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan mengkaji efektivitas PKH yang ada di Kampung Bonglai serta tinjauannya dalam perspektif Ekonomi Islam, tentu penelitian ini akan menghasilkan *output* berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan Secara Umum

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.¹ Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.²

Kemiskinan (*poverty*) merupakan istilah yang menyatakan tidak adanya kenikmatan hidup dan persediaan kebutuhanpun tidak sebanding. Istilah ini didefinisikan sebagai suatu titik kehilangan untuk pemeliharaan efisiensi secara fisik.³ Atau suatu keadaan ekonomi dimana terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan.⁴

¹ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: YKPN, 2002) hal. 112

² Chriswardani Suryawati, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 08/No.03/September/2005. hlm. 112

³ Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *kamus istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hlm.185

⁴ Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005) hlm.98-99

Dari banyaknya definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang penyebab kemiskinan. Kajian tersebut dapat terlihat pada definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers dan definisi tersebut yang saat ini mendapat perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang. Chambers menyatakan bahwa definisi kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi yaitu:

a. Kemiskinan (*proper*)

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pada kelompok yang telah memiliki pendapatan namun tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

b. Ketidakberdayaan (*powerless*)

Rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau kelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

c. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of Emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan yang cukup untuk menyelesaikannya.

d. Ketergantungan (*dependence*)

Lemahnya kekuatan sosial dari seseorang atau kelompok orang yang disebut miskin menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi.

e. Keterasingan (*isolation*)

Dimensi keterasingan yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Umumnya kondisi ini berada pada daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi.⁵

Dengan demikian dapat difahami bahwa masyarakat miskin merupakan masyarakat yang selalu berada pada kondisi ketidakberdayaan atau ketidakmampuan mereka dalam hal memenuhi kebutuhan dasar, yaitu ketidakmampuan dalam: (1) melakukan kegiatan usaha produktif, (2) menjangkau akses sumber daya sosial-ekonomi (3) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif, dan (4) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.

⁵ Rulan Ahmadi, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Pendekatan Modal Manusia (studi Layanan Publik tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang Diselenggarakan oleh BPM-KB dan Posko 100 di Kota Surabaya)*, Jurnal Administrasi Publik Vol. 10, No.2 (Desember 2012), hlm. 12

2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Masalah kemiskinan dan faktor penyebab kemiskinan memperluas pandangan ilmu pengetahuan bahwa kemiskinan tidak hanya sekedar tidak dapatnya seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional. Berdasarkan permasalahan tersebut kemiskinan memiliki 4 bentuk yakni sebagai berikut:

a. Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

b. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

c. Kemiskinan kultural

Kemiskinan yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan masyarakat modern.

d. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumberdaya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.⁶

Dari penjelasan bentuk kemiskinan seperti yang telah di jelaskan diatas dapat dipahami bahwa kemiskinan yang merupakan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan mampu menumbuhkan prilaku dan mentalitas miskin yang bermuara pada hilangnya kemerdekaan dalam berusaha dan menikmati kesejahteraan secara bermartabat.

Setelah mengenal bentuk kemiskinan berikut ini adalah jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya:

a. Kemiskinan alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya sarana umum (jalan raya, listrik, air bersih). Umumnya kondisi ini dialami oleh daerah yang belum terjangkau oleh pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

⁶ Michael P. Todaro dan Sthepan C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan*, (Jakarta: Erlangga, 2003) hlm. 247

b. Kemiskinan buatan

Adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau kemiskinan yang membuat masyarakat sulit untuk menguasai sumber daya alam, sarana umum, dan fasilitas ekonomi secara merata.

Dari penjelasan diatas dapat difahami bahwa kemiskinan bisa terjadi oleh sebab alamiah dan buatan. Seperti yang terjadi pada lokasi penelitian ini, dimana kemiskinan terjadi oleh sebab alamiah yang pada dasarnya masyarakat tersebut sudah terlahir sebagai keluarga miskin, namun yang memperparah keadaan adalah dimana masyarakat tidak mendapat sarana ekonomi secara merata.⁷

3. Program Pengentasan Kemiskinan

Untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8% sampai 10% pada akhir tahun 2014. Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, telah mengklasifikasikan kebijakan dalam tiga kelompok (*cluster*) yaitu sebagai berikut:⁸

⁷ Berdasarkan hasil penelitian masih banyaknya masyarakat Kampung Bonglai (lokasi Penelitian) yang belum mendapat sarana ekonomi secara merata, seperti masih banyaknya masyarakat miskin yang tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah.

⁸ TNP2K, *Program Penanggulangan Kemiskinan*, (On-line) tersedia di: <http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas/>, (diakses pada Senin, 10 Mei 2017 Pukul 10:22)

a. Klaster I

Klaster I adalah kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Fokus utama kebijakan ini adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan klasifikasi program ini meliputi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

b. Klaster II

Klaster II adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Fokus utama program ini adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan yang dimaksudkan agar masyarakat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Jenis program klaster II ini adalah PNPM Mandiri.

c. Klaster III

Klaster III adalah kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan memberikan modal atau pembiayaan dalam skala mikro. Program pada klaster III ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam menganggulangi kemiskinan. Hal ini terbukti dengan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang diberikan pemerintah salah satunya adalah PKH yang berupa bantuan tunai bersyarat yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin.

4. Pengertian Kemiskinan Dalam Konteks Ekonomi Islam

Menurut bahasa miskin berasal dari bahasa arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat, hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Qs. Al-balad ayat 16 sebagai berikut:

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾
Artinya: Atau kepada orang miskin yang sangat fakir.⁹

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-balad ayat 16 menjelaskan bahwa miskin adalah: “Yakni sangat miskin sehingga menempel di tanah, lagi tak punya apa-apa. Ibnu Abbas mengatakan bahwa *dza matrabah* artinya orang miskin yang terlempar di jalan (gelandangan), tidak punya rumah, dan tidak punya sesuatu yang dapat menghindarinya dari menempel di tanah.

Fakir/*al-faqr* yang berarti adalah keadaan seseorang atau sekelompok orang yang membutuhkan kebaikan, yang dimaksud dengan kebaikan dalam ayat ini menurut sebagian besar ahli tafsir ialah barang/sedikit makanan yang berarti membuthkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan dasar.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponogoro, 2011) hlm.

Sedang fakir didefinisikan sebagai orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali dikarenakan oleh sebab khusus yang syar'i (*uzur syar'i*), seperti usia tua dan sakit-sakitan.¹⁰ Tetapi dalam Islam kemiskinan tidak boleh menjadi penghambat seseorang melakukan kebaikan. Justru Islam mengajarkan kepada orang miskin untuk juga mau berinfak meski dalam jumlah yang sedikit, jangan sampai orang tidak pernah berbagi semasa hidupnya dengan alasan kemiskinan.¹¹

Dalam Islam, definisi kebutuhan pokok bukan hanya terkait dengan aspek kebutuhan materiil semata, namun juga terkait dengan aspek kebutuhan spiritual dan beribadah kepada Allah SWT. Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Qs. Al-Mulk ayat 15 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya : *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*¹²

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Mulk ayat 15 menjelaskan bahwa :
 “Berjalanlah kalian kemanapun yang kamu kehendaki diberbagai kawasannya, serta lakukanlah perjalanan mengelilingi semua daerah dan kawasannya untuk mencari mata pencaharian dan perniagaan (mencar rizki).

¹⁰ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 72

¹¹ *Ibid*, hlm. 74

¹² Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hlm. 563

Pemenuhan kebutuhan spiritual sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Qs. Thaha ayat 14 sebagai berikut:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي .

Artinya : *Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku.*¹³

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Thaha ayat 14 menjelaskan bahwa : “ini merupakan kewajiban pertama bagi orang mukalaf, yaitu hendaknya ia mengetahui bahwa tidak ada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan sholatlah untuk mengingat Allah.

Pada kedua surat diatas dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa kebutuhan manusia di muka bumi yaitu: pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan dan juga pemenuhan kebutuhan spiritual seperti yang dijelaskan pada ayat kedua Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya mendirikan shalat. Disebutkan ruku’ dan sujud karena keutamaan keduanya dan karena ia merupakan rukun shalat. serta keberuntungan terkait dengan beberapa perkara seperti shalat, ibadah dengan ikhlas dan berbuat baik kepada orang lain, seperti berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Arti falaah (keberuntungan) adalah tercapainya apa yang diharapkan dan selamat dari marabahaya, termasuk di antaranya adalah masuk ke dalam surga.

¹³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hlm. 313

5. Pengentasan Kemiskinan dalam perspektif Ekonomi Islam

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan ahlak, kelogisan berfikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islampun memandangnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Untuk mengatasi kemiskinan digunakan dan diterapkan sistem ekonomi Islam dengan karakteristik sebagai berikut: 1) Berusaha dan bekerja, 2) Larangan menumpuk harta, 3) Zakat, 4) Hukum waris, 5) Ghanimah, 6) Hemat. Namun seiring berkembangnya zaman tentu dari keenam poin yang masih relevan untuk diterapkan hanya 5 poin karena saat ini konsep ghanimah sudah tidak ada lagi.¹⁴

Menurut Quraisy Shihab, secara garis besar usaha pengentasan kemiskinan dalam islam dapat dibagi pada tiga hal pokok yaitu:

a. Kewajiban setiap individu

Dalam Islam setiap orang yang hidup dimuka bumi diwajibkan untuk bekerja atau mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya. Mereka juga diperintahkan agar berkelana dibumi Allah SWT serta makan dari rezeki-Nya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Qs. Al-Jumu'ah ayat 10 sebagai berikut:

¹⁴ Qardhawi, 2005 dalam Nurul Huda dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015) hlm. 25

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.¹⁵

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Jumu'ah ayat 10 menjelaskan bahwa : “setelah mereka dilarang untuk bertransaksi sesudah seruan yang memerintahkan mereka berkumpul (sholat), kemudian diizinkanlah bagi mereka sesudah itu untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah.

Pada surat Al-jumu'ah ayat 10 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa adanya kewajiban individu untuk bekerja/mencari nafkah. Hal ini merupakan salah satu cara utama dalam mengentaskan kemiskinan, ia adalah sarana utama dalam memperoleh kekayaan serta faktor dominan dalam memakmurkan dunia.

b. Kewajiban Kelompok/Masyarakat

Dalam hal mengatasi kemiskinan Islam memerintahkan anggota keluarga untuk saling menjamin dan mencukupi, artinya Islam telah meletakkan modal pertama bagi terciptanya jaminan sosial. Islam juga tidak bersikap acuh dan membiarkan nasib fakir miskin terlantar, sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan bagi mereka suatu hak

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hlm. 554

tertentu yang ada pada harta orang-orang kaya dan suatu bagian yang tetap dan pasti ialah zakat. Seperti dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 215 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya : Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan.¹⁶

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 215 menjelaskan bahwa : “Muqatil Ibnu Hayyan mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah naafkah *tatawwu'* . As-saddi mengatakan bahwa ayat ini di-nasakh oleh zakat, tetapi pendapatnya masih perlu dipertimbangkan. Makna ayat ini adalah seruan untuk membelanjakan harta kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan”.

Pada surat Al-Baqarah ayat 215 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa zakat yang diberikan adalah salah satu cara untuk saling menjamin dan mencukupi hidup baik antar kerabat dekat, anak yatim maupun sesama kaum muslim yang memerlukan pertolongan.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hlm. 33

c. Kewajiban Pemerintah

Dalam paradigma Islam Pemerintah berkewajiban dalam mengentaskan kemiskinan pada daerah yang ia pimpin sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Al-Hadid ayat 25 sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ ... ﴿٢٥﴾

Artinya : Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.¹⁷

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Hadid ayat 25 menjelaskan bahwa: “ maksud keadilan pada ayat ini menurut Mujahid dan Qatadah serta selain keduanya mengatakan bahwa keadilan itu ialah perkara hak yang diakui oleh rasio yang sehat lagi lurus dan bertentangan dengan pendapat-pendapat yang sakit lagi tidak benar”.

Pada surat Al-Hadid ayat 25 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa pemerintah merupakan pemimpin yang memangku amanah untuk mensejahterakan negara yang ia pimpin, termasuk penegakan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Komitmen Islam yang besar terhadap persaudaraan dan keadilan menuntut pada terpenuhinya kebutuhan hidup terutama pada kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hlm. 539

B. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Secara Umum

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut.¹⁸ Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kecukupan pemenuhan kebutuhan, orang yang merasa sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram dan batinnya terpelihara, ia merasa keadilan ada dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan terhindar dari bahaya kemiskinan yang mengancam.¹⁹

Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (1): “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.”²⁰

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa kesejahteraan merupakan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

¹⁸ Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012) hlm.

¹⁹ Anwar Abbas, *Bunghatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta, Multi Press Indo, 2008) hlm.126

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1)

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator-indikator kesejahteraan yang merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak.²¹ Berikut ini beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut beberapa instansi pemerintah, antara lain sebagai berikut:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Menurut BAPPENAS, status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok.²²

b. Badan Pusat Statistik (BPS)

Kriteria untuk menentukan atau rumah tangga miskin seperti:

- 1) luas bangunan peranggota rumah tangga /keluarga kurang dari 8 meter persegi.
- 2) Lantai rumah berupa tanah/papan dengan kualitas rendah.
- 3) Dinding rumah berupa bambu/papan dengan kualitas rendah.
- 4) Fasilitas MCK belum tersedia.
- 5) Sumber air minum bukan air minum bersih.

²¹ Badrudin, *Op.,Cit*, hlm.148

²² Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedeputan Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan, *Laporan Akhir "Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (keluarga pra sejahtera/KPS dan keluarga sejahtera I/KSI)*, BAPPENAS, Jakarta: 2010, hlm. 10

- 6) Sumber penerangan yang digunakan bukan listrik.
- 7) Jenis bahan bakar untuk memasak adalah kayu/arang.
- 8) Frekuensi makan dalam sehari kurang dari 2 kali.
- 9) Tidak mampu membeli daging /susu/ayam dalam seminggu.
- 10) Tidak memiliki kemampuan membeli baju baru setiap anggota rumah tangga.
- 11) Tidak memiliki kemampuan berobat kepuskesmas/poliklinik.
- 12) Lapangan pekerjaan berupa petani, nelayan, atau pekebun.
- 13) Pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat SD/tidak sekolah.
- 14) Tidak memiliki asset/barang berharga minimal Rp. 500.000.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi, maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin atau tidak sejahtera.²³

c. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

BKKBN membagi indikator kesejahteraan kedalam 5 (lima) tahapan tingkat kesejahteraan keluarga yaitu:

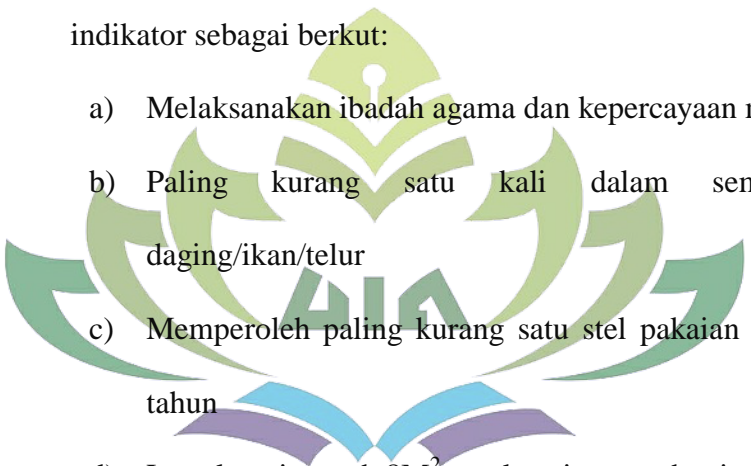
1) Tahap *pra sejahtera*

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keluarga berencana.

²³ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kemiskinan*, (On-line) tersedia di: www.bps.go.id, diakses pada (Jum'at 12 Mei 2017 Pukul 20:25 WIB)

2) Tahap *sejahtera I*

Keluarga *sejahtera I* adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang menjamin kehidupan yang layak. Secara operasional mereka tampak *tidak mampu* memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:

- 
- a) Melaksanakan ibadah agama dan kepercayaan masing-masing
 - b) Paling kurang satu kali dalam seminggu makan daging/ikan/telur
 - c) Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam satu tahun
 - d) Luas lantai rumah $8M^2$ untuk setiap penghuni rumah
 - e) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat
 - f) Ada anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan
 - g) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin
 - h) Pasangan usia subur dengan 2 atau lebih menggunakan alat kontrasepsi.

3) Tahap *Sejahtera II*

Secara operasional mereka tampak *tidak mampu* memenuhi salah satu indikator berikut:

- a) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama
- b) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang
- c) Makan bersama paling kurang satu kali dalam seminggu untuk berkomunikasi
- d) Mengikuti kegiatan masyarakat
- e) Memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV dan majalah

4) Tahap *sejahtera III*

Secara operasional mereka tampak tidak mampu memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:

- a) Memberikan sumbangan materil secara teratur
- b) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan

5) Tahap *sejahtera III plus*

Keluarga sejahtera III plus merupakan keluarga yang dapat memnuhi semua indikator dari krluarga para sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, dan sejahtera III.²⁴

²⁴ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Indikator Kemiskinan*, (On-line) tersedia di: www.bkkbn.go.id/datadaninformasi/materi/, diakses pada (Jum'at, 12 Mei 2017 Pukul 22:30 WIB)

Melihat dari kondisi masyarakat kampung bonglai, indikator kesejahteraan yang digunakan peneliti sebagai alat ukur kesejahteraan Kampung Bonglai adalah indikator kesejahteraan menurut BPS dikarenakan kriteria miskin yang digunakan BPS lebih sesuai dengan keadaan masyarakat yang ada pada daerah pedesaan sedangkan kriteria kemiskinan menurut BKKBN lebih tepat diterapkan di daerah perkotaan.

3. Pengertian Kesejahteraan (*falah*) dalam Ekonomi Islam

Istilah *falah* berasal dari bahasa arab dari kata *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.²⁵ *Falah*, adalah kehidupan yang mulia dan kesejahteraan di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Dengan tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat memberikan dampak yang disebut *masalahah*. *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan baik dalam material maupun non material, yaitu yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*masalahah*) dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu: (1) agama (*ad-dien*), (2) hidup atau jiwa (*nafs*), (3) keluarga atau keturunan (*nasl*), (4) harta atau kekayaan (*maal*), dan (5)

²⁵ Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009) hlm. 2

intelek atau akal (*aql*).²⁶ Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan yang mutlak terpenuhi, agar manusia dapat hidup bahagia didunia dan akhirat. Jika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.²⁷

Kesejahteraan dalam islam adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhi Kebutuhan Lahiriyah

Kesejahteraan yang paling utama didalam Al-Qur'an adalah menyembah tuhan (Allah), yang mengandung makna bahwa proses kesejahteraan didahului dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka yang paling utama adalah masyarakat yang benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada sang khalik.

2. Menghilangkan lapar

Mengandung makna bahwa diawali dengan penegasan kembali tentang tauhid, bahwa yang memberikan makan kepada yang lapar tersebut adalah Allah SWT, jadi ditegaskan bahwa rizki merupakan pemberian dar Allah SWT.

3. Menghilangkan rasa takut

Membuat rasa aman, nyaman dan tentram bagian dari indikator sejahtera atau tidaknya masyarakat. Jika masih banyak tindak kriminal

²⁶ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada) hlm. 62

²⁷ Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Op.Cit*, hlm. 6

seperti perampokan, pembunuhan atau kriminal lainnya maka dapat diindikasikan bahwa masyarakat tersebut belum sejatera. Selain ketentraman lingkungan dibutuhkan juga ketentraman batin yakni dengan cara istiqomah dalam keimanan. karena yang memberikan ketenangan yang hakiki hanyalah Allah SWT.

Komitemen Islam yang begitu intens terhadap persaudaraan dan keadilan menurut semua sumberdaya ditangan manusia sebagai titipan dari Allah dan harus di manfaatkan untuk mengaktualisasikan “*maqashid syari’ah*” diantaranya adalah:²⁸

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok.
- b. Sumberdaya pendapatan yang terhormat.
- c. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.

4. Indikator Kesejahteraan Masyarakat dalam ekonomi Islam

Islam tidak melarang seseorang berkonsumsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehingga memperoleh maslahat dan kemanfaatan yang setinggi-tingginya bagi kehidupan. Hal ini merupakan dasar dan tujuan dari syari’ah Islam sendiri yaitu *maslahat al-‘ibad* (kesejahteraan hakiki bagi manusia) dan sekaligus cara untuk mendapatkan *falah* (keberuntungan) yang maksimum. Pemenuhan kebutuhan yang diperbolehkan dalam Islam berkenaan dengan

²⁸ Adiwarman A, Karim, *Op.,Cit.* hlm 164

kebutuhan-kebutuhan manusia beserta alat-alat pemuasnya tidak hanya berkenaan dengan bidang materi tetapi juga rohani.²⁹

Indikator kesejahteraan menurut Islam yaitu kesejahteraan lahiriyah dan kesejahteraan batiniah sebagaimana dijelaskan firman Allah dalam Qs. Al-Qashash ayat 77 sebagai berikut:

وَأَتَّبِعْ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۚ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*³⁰

Dalam tafsir Ibu Katsir surat Al-Qashas ayat 77 menjelaskan bahwa: “gunakanlah harta yang berlimpah dan nikmat yang bergelimang sebagai karunia Allah kepadamu untuk bekal ketaatan kepada-Nya dengan mengerjakan berbagai amal pendekatan diri kepada-Nya yang denganya kamu akan memperoleh pahala dunia dan akhirat.

Pada surat Al-Qashas ayat 77 dan berasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan lahiriah dan kebutuhan batiniah.

²⁹ Indri dan Titik Triwulan Tutik, *Op., Cit.* hlm. 120

³⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* hlm. 394

C. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.³¹ Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.³² Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan suatu organisasi. Sedangkan pengertian efektivitas menurut beberapa ilmuan adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.
- b. Efektivitas menurut Martani dan Lubis merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

³¹ Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru* (Surabaya : Mekar, 2008), hlm. 132

³² Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm. 4.

- c. Efektivitas menurut Mahmudi merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.³³

Dari beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa para ahli di atas, maka dapat dipahami bahwa efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya yang ditentukan sebelumnya.

Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut.

2. Ukuran Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH)

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) didefinisikan sebagai

³³ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 92

pengukuran terhadap sejauhmana keberhasilan pelaksanaan PKH dalam memberikan kontribusi untuk membantu RTM. Indikator-indikator variabel ini dapat diukur sebagai berikut :

- a. Indikator *masukan*, merupakan langkah awal kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program yang mencakup tersedianya dana, tersedianya pedoman umum (pedum) dan persiapan sosialisasi.
- b. Indikator *proses*, merupakan tindak lanjut dari langkah pertama yaitu dilakukannya verifikasi data RTM penerima bantuan dan pelaksanaan sosialisasi.
- c. Indikator *keluaran*, setelah dilakukan sosialisasi RTM mengerti akan tujuan PKH, hak dan kewajiban RTM, serta dilakukannya penyaluran dana PKH kepada RTM penerima bantuan.
- d. Indikator *manfaat*, dana yang diterima oleh RTM merupakan dana yang diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan dan kesehatan.
- e. Indikator *dampak*, merupakan hasil dari program PKH yang disesuaikan dengan perilaku RTM dan para pengelola program. Jika tidak ada penyalahgunaan baik dari petugas dan penerima maka tujuan dari PKH yakni meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan akan tercapai dengan baik.

D. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH bukan merupakan lanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu RTM mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat. Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan Pembangunan *Millenium*. Lima komponen tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan angka kematian ibu melahirkan.³⁴

³⁴ TNP2K, Panduan Umum, *Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2017) hlm. 1

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM. Tujuan khusus PKH meliputi empat hal yaitu:

- a. Meningkatkan status sosial ekonomi RTM.
- b. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTM .
- d. Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan anak-anak RTM.³⁵

3. Hak dan Kewajiban Peserta PKH

Agar dapat memperoleh bantuan tunai, Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH adalah sebagai berikut:

a. Kesehatan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan seperti di bawah ini:

³⁵ Ibid. hlm. 5

Anak Usia 0-6 Tahun:

- 1) Anak usia 0-28 hari (*neonatus*) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.
- 2) Anak usia 0–11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- 3) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus. Anak usia 12–59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- 4) Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/*Early Childhood Education*) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

Ibu Hamil dan Ibu Nifas:

- 1) Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.

- 2) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
- 3) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI.

b. Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan yakni kehadiran di satuan pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dengan beberapa catatan seperti di bawah ini:

- 1) Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
- 2) Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun, anak Peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/ Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Paket A atau SMP/MTs Terbuka)
- 3) Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka Peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.

- 4) Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.
- 5) Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut Pekerja Anak (PA) atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Pengurangan Pekerja Anak.
- 6) Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut Anak Jalanan (AJ) dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Kesejahteraan Sosial Anak.

c. Lansia 70 Tahun Keatas

- 1) Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia)
- 2) Mengikuti kegiatan sosial (*day care*)

d. Penyandang Disabilitas Berat

- 1) Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan

- 2) Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah (*home care*)

Bila persyaratan di atas kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok lansia dan penyandang disabilitas berat dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur dan memiliki hak-hak sebagai anggota, hak-hak peserta PKH adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program.
- 2) Mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
- 3) Teraftar dan mendapatkan program-program komplementaritas dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.
- 4) Bagi lansia diatas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.³⁶

4. Besaran Bantuan

Besaran bantuan PKH pada setiap komponen berbeda. Besaran bantuan untuk setiap RTM peserta PKH mengikuti skenario bantuan yang disajikan pada tabel dibawah ini:

³⁶ *Ibid.* hlm. 8-10

Tabel 2.1
Besaran Bantuan Komponen PKH

NO	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (Rp)
1	Bantuan ibu hamil/menyusui	Rp. 1.200.000
2	Bantuan anak usia dibawah 6 tahun	Rp. 1.200.000
3	Bantuan peserta pendidikan setara SD/ Sederajat	Rp. 450.000
4	Bantuan peserta pendidikan setara SMP/ Sederajat	Rp. 750.000
5	Bantuan peserta pendidikan setara SMA/ Sederajat	Rp. 1.000.000
6	Bantuan penyandang disabilitas berat	Rp. 3.100.000
7	Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas	Rp. 1.900.000

Sumber: *keputusan Dinas Sosial RI*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besaran bantuan setiap komponen berbeda-beda. Apabila besar bantuan yang diterima RTM melebihi batas maksimum/dalam satu keluarga memiliki lebih dari 4 komponen penerima bantuan (bantuan minimum per RTM Rp. 600.000, bantuan maksimum per RTM Rp. 2.200.000) maka bantuan yang diberikan adalah komponen yang menerima bantuan dengan nominal paling besar.

Pembayaran bantuan dilakukan dalam dua sampai empat tahap dalam satu tahun yang dijadwalkan untuk dilakukan pada bulan Maret–Juni–September–November. Hal ini merupakan ketentuan dari pemerintah pusat. Jadwal pembayaran di masing-masing kecamatan yang diputuskan oleh Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Lembaga Pembayaran. Pembayaran pertama untuk peserta baru tidak diperlukan verifikasi kepatuhan Peserta PKH.

Dana Bantuan Tunai langsung dibayarkan kepada Peserta PKH melalui rekening bank/wesel/giro online (GOL) Pengurus Peserta PKH pada Lembaga Pembayar dan diambil langsung oleh Peserta PKH. Pada saat pembayaran pendamping wajib memastikan kesesuaian antara Kartu Peserta PKH dengan Kartu Identitas (KTP) serta mengumpulkan bukti pembayaran (RS2B atau slip penarikan). Agar RTM bisa menerima haknya maka setiap RTM wajib menjalankan kewajibannya selaku peserta PKH. Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam tiga bulan, maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut:

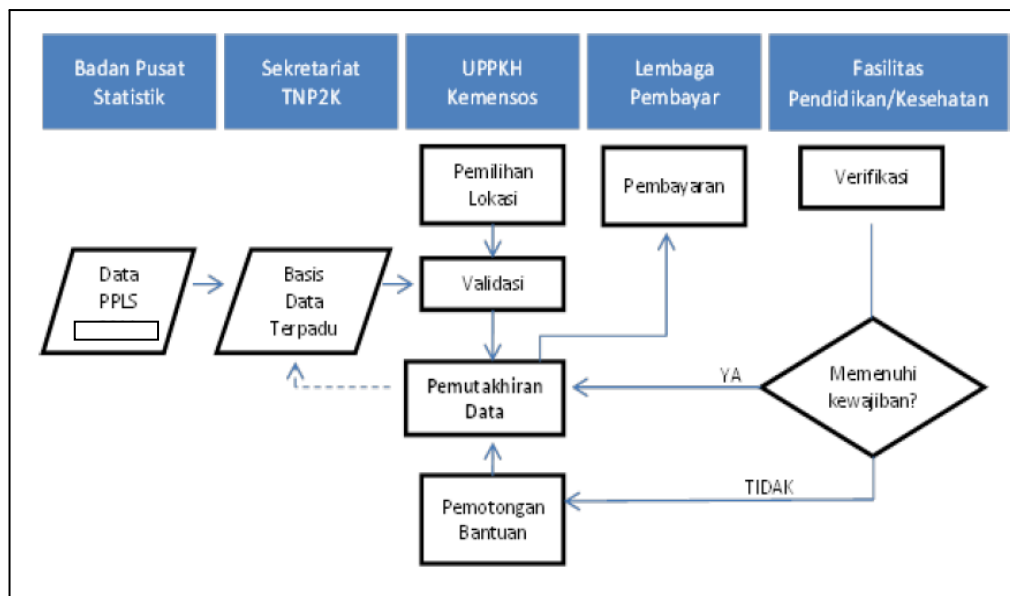
- 1) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 50,000,-
- 2) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 100,000,-
- 3) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 150,000,-
- 4) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-turut,
- 5) maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.
- 6) Ketentuan di atas berlaku secara *tanggung renteng* untuk seluruh anggota keluarga penerima bantuan PKH.³⁷

³⁷ *Ibid.* hlm. 9-10

5. Mekanisme Pelaksanaan PKH

Penyaluran dana bantuan tunai bersyarat adalah kegiatan utama PKH yang terdiri dari 6 (enam) tahap kegiatan berkelanjutan yang saling terkait satu sama lain keenam tahap tersebut dapat dilihat pada skema proses utama pelaksanaan PKH sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Proses Utama Pelaksanaan PKH



Sumber: UPPKH Kecamatan Banjit

Dari skema diatas menunjukkan bagaimana proses utama pelaksanaan PKH yang kemudian dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Penyediaan data calon Peserta PKH (mulai tahun 2012 bersumber dari Basis Data Terpadu/berdasarkan data dari BPS).
- 2) Penetapan lokasi dan penentuan calon Peserta PKH (Penetapan Sasaran).

- 3) Pengecekan keabsahan, kebenaran, dan perubahan data calon Peserta PKH (Validasi).
- 4) Pembayaran dana tunai yang terdiri dari:
 - a. Pembayaran pertama setelah validasi bagi peserta baru dilakukan.
 - b. Pembayaran selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi bagi peserta lainnya.
- 5) Verifikasi kepatuhan kewajiban.
- 6) Pemutakhiran data.³⁸

Penyaluran dana bantuan tunai bersyarat dilakukan sesuai dengan pedoman umum yang telah ditetapkan

³⁸ *Ibid*, hlm. 19-20

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kampung Bonglai

Kampung Bonglai merupakan salah satu Kampung yang berada di Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Dengan luas wilayah seluruhnya mencapai 8.600 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 4.916 jiwa. Kampung Bonglai merupakan salah satu kampung dari 19 (Sembilan belas) kampung yang ada di Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan. Berada pada ketinggian ± 165 dpl (longitud) 6,70543 °E dan etitut 106,70543 °E) dan curah hujan ± 200 mm, rata-rata suhu udara 28°-32° celcius. Pada umumnya penduduk Kampung Bonglai bekerja di sektor pertanian/perladangan. Batas wilayah Kampung Bonglai adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kampung Campang Delapan Kecamatan Banjit
- b. Sebeah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sumber Jaya Lampung Barat
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Campan Delapan Kecamatan Banjit

a) Ruang Lingkup Keadaan Kampung Bonglai

Kampung Bonglai terdiri dari beberapa suku diantaranya suku ogan, jawa, semendo, dan suku sunda. Tingkat kehidupan masyarakat Kampung Bonglai pada umumnya bergerak dibidang pertanian, sebagian besar sebagai petani penggarap dan buruh kebun dan sebagian lainnya bekerja pada bidang yang bermacam-macam.

b) Arah Kebijakan Pengembangan

Untuk mencapai keseimbangan pembangunan daerah yang serasi dan berkelanjutan dengan proses pemberdayaan masyarakat pedesaan dan pembangunan ekonomi yang dapat menunjang program pengentasan kemiskinan melalui program penyediaan sarana dan prasarana pembangunan perekonomian rakyat, akan memberikan suatu kerangka dalam upaya pemanfaatan potensi wilayah Kampung Bonglai yang menekankan kepada sinergi tiga hal pokok yaitu integritas kebijaksanaan pengembangan wilayah, sinkronisasi kegiatan pembangunan sektor, dan akomodasi atas potensi dan kebutuhan masyarakat.

2. Kondisi masyarakat Kampung Bonglai

Data komposisi masyarakat sangat penting untuk perencanaan pemerintah dalam segala bidang, terutama digunakan pemerintah dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dapat diukur

dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat agar dapat diketahui sejahtera atau tidaknya masyarakat tersebut. Berikut ini beberapa indikator kesejahteraan masyarakat pada warga kampung Bonglai yaitu:

a. Tingkat Kebutuhan Dasar

1) Pengeluaran Konsumsi

Tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga masyarakat dapat dilihat berdasarkan pengeluaran untuk biaya pangan dan non pangan dengan merata-ratakan minimal pengeluaran perbulannya, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Pola Konsumsi Masyarakat Kampung Bonglai

No.	Pola Konsumsi	Jumlah Pengeluaran (perbulan)
1	Kebutuhan Pangan/Makanan	Rp. 700.000
2	Kebutuhan Sandang/Pakaian	Rp. 300.000
3	Biaya Pendidikan	Rp. 500.000
4	Biaya Kesehatan	Rp. 250. 000
5	Pengeluaran Lain (Listrik, air dll)	Rp. 200.000

Sumber: Hasil wawancara Staf Kantor Kelurahan Kampung Bonglai¹

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pengeluaran rumah tangga terbesar adalah pengeluaran untuk makanan/pangan, disusul oleh konsumsi pendidikan yang merupakan konsumsi terbesar kedua setelah konsumsi pangan²

¹ Wawancara Bapak Nursata, Sekretaris Kampung Bonglai, pada (Jum'at, 14 April 2017 Pukul 09:30 WIB)

² Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, kebutuhan pangan masyarakat Kampung Bonglai hanya berkisar antara Rp.300.000-Rp.500.00 per bulan. Hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat

2) *Tingkat perumahan*

Keadaan atau kondisi tempat tinggal menjadi salah satu indikator penentu tingkat kesejahteraan. Dari hasil wawancara yang didapat masyarakat Kampung Bonglai rata-rata banyak memiliki rumah layak huni bahkan sebagian memiliki rumah permanen walaupun ada saja yang belum memiliki sertifikat hak milik.

3) *Tingkat kesehatan*

Untuk fasilitas kesehatan masyarakat Kampung Bonglai memiliki prasarana kesehatan seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Jumlah Prasarana Kesehatan di Kampung Bonglai

No.	Jenis Prasarana Kesehatan	Lokasi
1	Posyandu Kaktus 1	Dusun 4
2	Posyandu Kaktus 2	Dusun 5
3	Posyandu Kaktus 3	Dusun 1
4	Posyandu Kaktus 4	Dusun 10
5	Posyandu Kaktus 5	Dusun 8

Sumber :Hasil Wawancara staf Kantor Kelurahan Kampung Bonglai³

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa prasarana kesehatan yang ada di Kampung Bonglai memilik 5 pos posyandu. Kampung Bonglai tidak memiliki Puskesmas namun jarak dari Kampung Ke

Kampung mampu memenuhi kebutuhan pokok dari hasil bercocok tanam yang dilakukan sendiri oleh mmasyarakat Kampung Bonglai.

³ Wawancara Bapak Nursata, Sekretaris Kampung Bonglai, pada (Jum'at, 14 April 2017 Pukul 09:30 WIB)

Puskesmas hanya \pm 15 km. kampung Bonglai juga memiliki dokter/ bidan desa yang secara rutin melakukan kunjungan perbulannya.

4) *Tingkat perlindungan*

Dalam hal perlindungan, masyarakat Kampung Bonglai telah mendapat perlindungan dengan baik. Dengan terbuktinya masyarakat diberikan kemudahan dalam urusan surat menyurat seperti pembuatan E-KTP dan kepengurusan kartu keluarga (KK).

b. **Tingkat kehidupan**

1) *Tingkat pendapatan*

Besaran pendapatan masyarakat Kampung Bonglai berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Pendapatan Rata-rata Masyarakat Kampung Bonglai
Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penghasilan
1	Pedagang	Rp. 500.00 – Rp. 1.500.000
2	Petani	Rp. 500.00 – Rp. 2.000.000
3	TNI/POLRI	Rp. 2.500.000 – Rp. 5.000.000
4	PNS	Rp. 1.500.000 – Rp. 4.500.000

Sumber: Data diolah dari dokumentasi/profil Kampung Bonglai tahun 2016⁴

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa besaran pendapatan masyarakat Kampung Bonglai bervariasi, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Dapat dikatakan bahwa beberapa masyarakat Kampung Bonglai berpenghasilan diatas rata-rata batas minimum

⁴ Dokumentasi/profil Kampung Bonglai Tahun 2015

nilai kesejahteraan dan terdapat juga masyarakat berpenghasilan dibawah batas minimum nilai kesejahteraan.

2) Pendidikan

Tingkat pendidikan di Kampung Bonglai dipengaruhi dengan adanya sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Berikut ini adalah prasarana pendidikan yang ada di Kampung Bonglai, yaitu:

Tabel 3.4
Sarana Pendidikan Di Kampung Bonglai

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK/PAUD	3
2	SD	3
3	SMP/Sederajat	1
4	SMA/Sederajat	-

Sumber: *Data diolah dari dokumentasi/profil Kampung Bonglai tahun 2016*⁵

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa prasarana penunjang pendidikan di Kampung Bonglai cukup baik untuk menunjang pendidikan masyarakat sampai ke jenjang SMP. Namun untuk jenjang SMA/Sederajat masyarakat Kampung Bonglai harus keluar daerah Kampung Bonglai untuk melanjutkan pendidikannya.

3. Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Bonglai

a. Sejarah PKH di Kampung Bonglai

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa kemiskinan di Kampung Bonglai mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini memberikan bukti bahwa segala bentuk program pemerintah belum berjalan secara

⁵ Dokumentasi/profil Kampung Bonglai tahun 2016

maksimal termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Oleh sebab itu keefektifan suatu program penanggulangan kemiskinan harus benar-benar dilakukan penelitian. PKH di Kampung Bonglai berlangsung sejak tahun 2004. Penyaluran PKH bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Disamping itu, program ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan yang ada di negara ini.⁶ Melalui PKH pemerintah memberikan bantuan tunai bersyarat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia diatas 70 tahun dan bagi penyandang disabilitas berat. Bantuan ini tidak diberikan dengan cuma-cuma, penerima bantuan PKH harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan serta penerima bantuan harus memenuhi komponen penerima bantuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Komponen penerima bantuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bantuan diberikan kepada maksimal anggota keluarga sesuai dengan komponen dan kriteria.
- 2) Jika dalam satu keluarga terdapat lebih dari tiga anggota keluarga, maka bantuan PKH diberikan kepada komponen dengan nilai nominal terbesar.

⁶ Wawancara Bapak Meji Satria, Pendamping PKH Wialayah Kampung Bonglai, pada (Selasa, 18 Mei 2017 Pukul 10:00 WIB)

- 3) Ibu hamil termasuk dalam komponen, tetapi kehamilan keempat tidak termasuk dalam tambahan komponen kepesertaan.

Berikut ini adalah jumlah penerima manfaat PKH untuk rumah tangga miskin di Kampung Bonglai, yaitu:

Tabel 3.5
Jumlah Penerima PKH Kampung Bonglai

No.	Peserta PKH	Jumlah RTM
1	Peserta PKH tahap I Tahun 2014	70 RTM
2	Peserta PKH tahap II Tahun 2016	75 RTM
Total		145 RTM

Sumber: *Dokumentasi Kampung Bonglai tahun 2017*⁷

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa jumlah RTM penerima manfaat PKH di kampung Bonglai pada tahun 2014/tahap pertama berjumlah 70 RTM dan di tahun 2016 mengalami penambahan sebanyak 75 RTM dengan jumlah keseluruhan penerima bantuan sebesar 145 RTM. Dengan meningkatnya jumlah RTM penerima bantuan PKH, oleh sebab itu keefektipan program PKH di Kampung Bonglai perlu dilakukan penelitian, apakah dengan adanya PKH di Kampung Bonglai dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada selama ini.

⁷ Dokumentasi Kampung Bonglai tahun 2017

b. Implementasi PKH di Kampung Bonglai

Menurut Kepala Kampung Bonglai, Bahwa seluruh dusun di kampung Bonglai telah menerima bantuan PKH terhitung sejak tahun 2014. Fakta yang ditemukan dilapangan bahwa implementasi penetapan peserta penerima PKH di Kampung Bonglai tidak sesuai dengan kriteria penetapan RTM penerima bantuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam implementasi pelaksanaan PKH masih ditemukan peserta PKH yang dikategorikan sebagai keluarga sejahtera namun tercantum sebagai peserta PKH yang mendapat bantuan tunjangan pendidikan dan kesehatan untuk keluarga miskin/tidak mampu. Tentu hal ini merupakan kesalahan yang mengakibatkan kesenjangan dan tidak meratanya distribusi dari program PKH ini. PKH di Kampung Bonglai masih belum bisa dikatakan efektif karena masih banyaknya masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan tetapi belum mendapat bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Jarsiti salah satu peserta PKH, menyatakan bahwa:

“Pada saat pertemuan rutin hampir sebagian dari peserta tidak mengerti atau kurang memahami terhadap tujuan PKH dan pengalokasian sesungguhnya dana PKH, dikarenakan kondisi ruang pertemuan yang kurang kondusif sehingga penyampaian informasi kurang efektif. Serta penentuan peserta yang kurang bijaksana membuat penentuan penerima bantuan tidak tepat sasaran”.⁸

⁸ Wawancara ibu Jarsiti, Peserta PKH Kampung Bonglai Kecamatan Banjit pada (Selasa, 18 Mei 2017 Pukul 19:40 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rumsiyah salah satu peserta PKH, menyatakan bahwa:

“Pada tahun 2017 ini penerimaan dana PKH tidak lagi melalui kantor POS seperti yang sudah dijalankan selama ini, pencairan dana PKH akan dialihkan melalui ATM, dan dana bantuan yang diterima tidak sepenuhnya diberikan dalam bentuk uang seperti yang telah lalu namun akan diberikan setengah dari dana yang diterima berbentuk uan dan setengahnya diberikan dalam bentuk barang yang bisa di dapatkan di E-warung yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Tentu hal ini membuat kekhawatiran para peserta karna sangat rumit. Hal ini terjadi karena latar Belakang masyarakat yang mayoritas berpendidikan rendah dan gagal teknologi”.⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan ibu Jarsiti dan ibu Rumsiyah bahwa PKH di Kampung Bonglai ini belum bisa dikatakan efektif, karena masih banyaknya ketidaktepatan sasaran dalam pemilihan penerima bantuan PKH, di Kampung Bonglai juga masih banyak ditemukan masyarakat yang kurang memahami arti/tujuan dari PKH sehingga dalam pemanfaatannya kurang efektif dan efesien. Adanya peraturan baru yaitu peralihan pencairan dana yang semula di ambil melalui kantor POS kini beralih ke ATM, hal ini meresahkan warga hal ini dikarenakan latar Belakang masyarakat yang kurang akan ilmu pengetahuan dan teknologi.

⁹ Wawancara Ibu Rumsiyah, Peserta PKH Kampung Bonglai Kecamatan Banjit pada (Selasa, 17 April 2017 Pukul 20:30 WIB)

3. Karakteristik Responden

Pada bagian ini karakteristik responden yang akan dibahas yaitu dimulai dari usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan utama dan jumlah komponen penerima bantuan PKH. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan sesuai dengan pokok masalah yang ingin penulis teliti. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kampung Bonglai dengan jumlah responden 70 orang.

a. Usia Responden

Usia responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Usia responden

No.	Usia	Jumlah Responden	Persentase
1	< 20 Tahun	-	
2	21 – 30 Tahun	11	16%
3	31 – 40 Tahun	35	50%
4	>41 Tahun	24	34%
Total		70	100%

Sumber: *Data diolah dari hasil observasi*

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berusia kurang dari 20 tahun tidak ada, kemudian responden yang berusia antara 21-30 tahun berjumlah 11 atau 16% sedangkan responden yang berusia 31-40 tahun berjumlah 35 atau sebesar 50% dan responden yang berusia lebih dari 40 tahun berjumlah 24 orang atau sebesar 34%.

b. Berdasarkan pekerjaan responden

Pekerjaan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Jenis Pekerjaan

No.	Jenis pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase
1	Ibu Rumah Tangga	3	4%
2	Petani	62	88%
3	Buruh	-	-
4	Pedagang	5	7%
Jumlah		70	100%

Sumber: Data diolah dari hasil observasi peneliti

Berdasarkan data dari tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga yaitu sebanyak 3 orang atau 4%, sedangkan untuk jumlah responden yang berprofesi sebagai petani sebanyak 62 orang atau 88%, responden yang berpropesi sebagai buruh sebanyak 0 (tidak ada), responden yang berprofesi sebagai pedagang berjumlah 5 orang atau 7%

c. Berdasarkan Tingkat pendidikan responden.

Tingkat pendidikan responden pada penelitian ini dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Tingkat Pendidikan responden

No.	Jenis pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase
1	Tidak tamat SD	13	18,5%
2	SD/Sederajat	41	58,5%
3	SMP/Sederajat	16	23%
4	SMA/Sederajat	-	-
Jumlah		70	100%

Sumber: data diolah hasil observasi peneliti

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa responden dengan tingkat pendidikan tidak lulus SD adalah 13 orang atau 18,5%, responden dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 41 orang atau 58,5%, responden dengan tingkat SMP sebanyak 16 orang atau 23%.

4. Hasil Jawaban Kuisisioner (Angket) Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kampung Bonglai

Untuk mengetahui efektivitas PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Kampung Bonglai, perolehan data melalui penyebaran angket sebanyak 20 pertanyaan untuk 70 sampel/peserta PKH. Dari hasil sebaran kuisisioner diperoleh fakta/hasil dari pertanyaan yang diajukan pada responden yang tergambar pada tabel dibawah ini:

Hasil jawaban kuisisioner pada butir pertanyaan nomor 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Hasil Sebaran Kuesioner

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		Persentase
		Ya	Tidak	
1.	Apakah ibu mendapat informasi mengenai PKH dari petugas PKH/pejabat desa?	70	-	100%

Sumber: *Data diolah dari hasil kuesioner penelitian tahun 2017*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab Ya pada sebaran kuesioner nomor satu adalah sebanyak 70 orang atau 100%, sedangkan responden yang menjawab Tidak adalah nol/tidak ada.

Hasil jawaban kuesioner pada butir pertanyaan nomor 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Hasil Sebaran Kuesioner

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		Persentase
		Ya	Tidak	
2.	Apakah ibu mendapat pendampingan yang baik dari pendamping PKH?	70	-	100%

Sumber: *Data diolah dari hasil kuesioner penelitian tahun 2017*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab Ya pada sebaran kuesioner nomor 2 adalah sebanyak 70 orang atau 100%, sedangkan responden yang menjawab Tidak adalah nol/tidak ada.

Hasil jawaban kuesioner pada butir pertanyaan nomor 3 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Hasil Sebaran Kuesioner

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		Persentase
		Ya	Tidak	
3.	Apakah pendamping PKH mengadakan pertemuan dengan rutin?	70	-	100%

Sumber: *Data diolah dari hasil kuesioner penelitian tahun 2017*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab Ya pada sebaran kuesioner nomor 3 adalah sebanyak 70 orang atau 100%, sedangkan responden yang menjawab Tidak adalah nol/tidak ada.

Hasil jawaban kuesioner pada butir pertanyaan nomor 4 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Hasil Sebaran Kuesioner

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		Persentase
		Ya	Tidak	
4.	Apakah ibu turut menghadiri pertemuan dengan rutin?	70	-	100%

Sumber: *Data diolah dari hasil kuesioner penelitian tahun 2017*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab Ya pada sebaran kuesioner nomor 4 adalah sebanyak 70 orang atau 100%, sedangkan responden yang menjawab Tidak adalah nol/tidak ada.

Hasil jawaban kuesioner pada butir pertanyaan nomor 5 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Hasil Sebaran Kuesioner

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		Persentase
		Ya	Tidak	
5.	Apakah sebelum pelaksanaan PKH diadakan sosialisasi oleh petugas/ pemerintah desa?	70	-	100%

Sumber: *Data diolah dari hasil kuesioner penelitian tahun 2017*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab Ya pada sebaran kuesioner nomor 5 adalah sebanyak 70 orang atau 100%, sedangkan responden yang menjawab Tidak adalah nol/tidak ada.

Hasil jawaban kuesioner pada butir pertanyaan nomor 6 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Hasil Sebaran Kuesioner

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		Persentase
		Ya	Tidak	
6.	Apakah setelah adanya sosialisasi ibu dapat mengerti tujuan, kewajiban serta hak-hak ibu sebagai peserta PKH?	58	12	83%+17%= 100%

Sumber: *Data diolah dari hasil kuesioner penelitian tahun 2017*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab Ya pada sebaran kuesioner nomor 6 adalah sebanyak 58 orang atau 83%, sedangkan responden yang menjawab Tidak adalah sebanyak 12 orang atau 17%.

Hasil jawaban kuesioner pada butir pertanyaan nomor 7 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Hasil Sebaran Kuesioner

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		Persentase
		Ya	Tidak	
7.	Apakah syarat-syarat yang telah ditentukan memberatkan ibu sebagai peserta PKH?	70	-	100%

Sumber: Data diolah dari hasil kuesioner penelitian tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab Ya pada sebaran kuesioner nomor 7 adalah sebanyak 70 orang atau 100%, sedangkan responden yang menjawab Tidak adalah nol/tidak ada.

Hasil jawaban kuesioner pada butir pertanyaan nomor 8 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Hasil Sebaran Kuesioner

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		Persentase
		Ya	Tidak	
8.	Apakah syarat-syarat yang telah ditentukan memberatkan ibu sebagai peserta PKH?	70	-	100%

Sumber: Data diolah dari hasil kuesioner penelitian tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab Ya pada sebaran kuesioner nomor 8 adalah sebanyak 70 orang atau 100%, sedangkan responden yang menjawab Tidak adalah nol/tidak ada.

Hasil jawaban kuesioner pada butir pertanyaan nomor 9 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Hasil Sebaran Kuesioner

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		Persentase
		Ya	Tidak	
9.	Apakah ibu telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan?	70	-	100%

Sumber: *Data diolah dari hasil kuesioner penelitian tahun 2017*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab Ya pada sebaran kuesioner nomor 9 adalah sebanyak 70 orang atau 100%, sedangkan responden yang menjawab Tidak adalah nol/tidak ada.

Hasil jawaban kuesioner pada butir pertanyaan nomor 10 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Hasil Sebaran Kuesioner

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		Persentase
		Ya	Tidak	
10.	Apakah tahap pencairan dana dilakukan tepat waktu?	70	-	100%

Sumber: *Data diolah dari hasil kuesioner penelitian tahun 2017*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab Ya pada sebaran kuesioner nomor 10 adalah sebanyak 70 orang atau 100%, sedangkan responden yang menjawab Tidak adalah nol/tidak ada.

Hasil jawaban kuesioner pada butir pertanyaan nomor 11 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19
Hasil Sebaran Kuesioner

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		Persentase
		Ya	Tidak	
11.	Apakah dana PKH yang diterima sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan?	70	-	100%

Sumber: Data diolah dari hasil kuesioner penelitian tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab Ya pada sebaran kuesioner nomor 11 adalah sebanyak 70 orang atau 100%, sedangkan responden yang menjawab Tidak adalah nol/tidak ada.

Hasil jawaban kuesioner pada butir pertanyaan nomor 12 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Hasil Sebaran Kuesioner

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		Persentase
		Ya	Tidak	
12.	Apakah ada pemotongan jumlah dana dari pihak tertentu?	70	-	100%

Sumber: Data diolah dari hasil kuesioner penelitian tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab Ya pada sebaran kuesioner nomor 12 adalah sebanyak 70 orang atau 100%, sedangkan responden yang menjawab Tidak adalah nol/tidak ada.

Hasil jawaban kuesioner pada butir pertanyaan nomor 13 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21
Hasil Sebaran Kuesioner

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		Persentase
		Ya	Tidak	
12.	Apakah dana yang ibu terima ibu gunakan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan bagi lansia dan disabilitas berat?	70	-	100%

Sumber: Data diolah dari hasil kuesioner penelitian tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab Ya pada sebaran kuesioner nomor 12 adalah sebanyak 70 orang atau 100%, sedangkan responden yang menjawab Tidak adalah nol/tidak ada.

Hasil jawaban kuesioner pada butir pertanyaan nomor 13 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22
Hasil Sebaran Kuesioner

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		Persentase
		Ya	Tidak	
13.	Apakah dana yang ibu terima ibu gunakan untuk kebutuhan lain selain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan bagi lansia dan disabilitas berat?	30	40	43%+57%= 100%

Sumber: Data diolah dari hasil kuesioner penelitian tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab Ya pada sebaran kuesioner nomor 13 adalah sebanyak 30 orang atau 43%, sedangkan responden yang menjawab Tidak adalah 40 orang atau 57%.

Hasil jawaban kuesioner pada butir pertanyaan nomor 14 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23
Hasil Sebaran Kuesioner

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		Persentase
		Ya	Tidak	
14.	Apakah setelah menjadi anggota PKH kebutuhan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan bagi lansia dan disabilitas berat terpenuhi?	33	37	$47\% + 53\% = 100\%$

Sumber: Data diolah dari hasil kuesioner penelitian tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab Ya pada sebaran kuesioner nomor 14 adalah sebanyak 33 orang atau 47%, sedangkan responden yang menjawab Tidak adalah 37 orang atau 53%.

Hasil jawaban kuesioner pada butir pertanyaan nomor 15 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24
Hasil Sebaran Kuesioner

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		Persentase
		Ya	Tidak	
15.	Apakah dengan adanya PKH kualitas kebutuhan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan bagi lansia dan disabilitas berat meningkat?	70	-	100%

Sumber: Data diolah dari hasil kuesioner penelitian tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab Ya pada sebaran kuesioner nomor 15 adalah sebanyak 70 orang atau 100%, sedangkan responden yang menjawab Tidak adalah nol/tidak ada.

Hasil jawaban kuesioner pada butir pertanyaan nomor 16 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25
Hasil Sebaran Kuesioner

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		Persentase
		Ya	Tidak	
16.	Apakah ibu termasuk dalam keluarga dengan status ekonomi menengah kebawah?	70	-	100%

Sumber: *Data diolah dari hasil kuesioner penelitian tahun 2017*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab Ya pada sebaran kuesioner nomor 16 adalah sebanyak 70 orang atau 100%, sedangkan responden yang menjawab Tidak adalah nol/tidak ada.

Hasil jawaban kuesioner pada butir pertanyaan nomor 17 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26
Hasil Sebaran Kuesioner

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		Persentase
		Ya	Tidak	
17.	Apakah ada manfaat nyata yang ibu rasakan setelah menjadi anggota PKH?	70	-	100%

Sumber: *Data diolah dari hasil kuesioner penelitian tahun 2017*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab Ya pada sebaran kuesioner nomor 17 adalah sebanyak 70 orang atau 100%, sedangkan responden yang menjawab Tidak adalah nol/tidak ada.

Hasil jawaban kuesioner pada butir pertanyaan nomor 18 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27
Hasil Sebaran Kuesioner

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		Persentase
		Ya	Tidak	
18.	Menurut ibu, apakah ibu layak mendapat bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan?	70	-	100%

Sumber: *Data diolah dari hasil kuesioner penelitian tahun 2017*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab Ya pada sebaran kuesioner nomor 18 adalah sebanyak 70 orang atau 100%, sedangkan responden yang menjawab Tidak adalah nol/tidak ada.

Hasil jawaban kuesioner pada butir pertanyaan nomor 19 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28
Hasil Sebaran Kuesioner

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		Persentase
		Ya	Tidak	
19.	Apakah PKH telah mensejahterakan keluarga ibu?	18	52	26%+74%= 100%

Sumber: *Data diolah dari hasil kuesioner penelitian tahun 2017*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab Ya pada sebaran kuesioner nomor 19 adalah sebanyak 18 orang atau 26%,

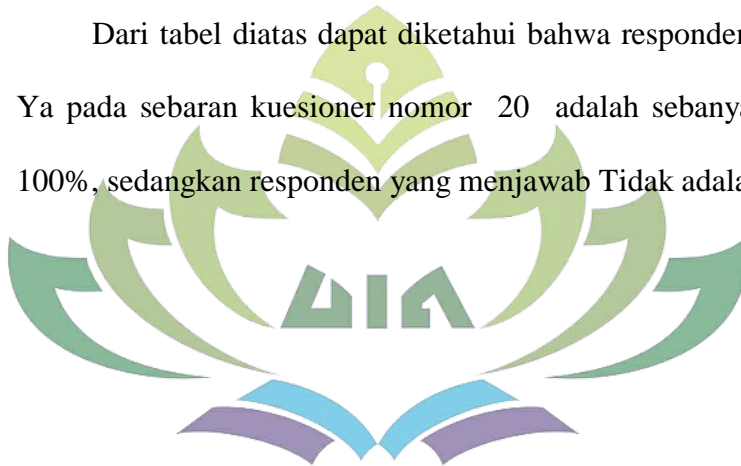
sedangkan responden yang menjawab Tidak adalah 52 orang atau sebesar 74%. Hasil jawaban kuesioner pada butir pertanyaan nomor 20 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29
Hasil Sebaran Kuesioner

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		Persentase
		Ya	Tidak	
20.	Apakah PKH perlu dilanjutkan?	70	-	100%

Sumber: *Data diolah dari hasil kuesioner penelitian tahun 2017*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab Ya pada sebaran kuesioner nomor 20 adalah sebanyak 70 orang atau 100%, sedangkan responden yang menjawab Tidak adalah nol/tidak ada.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kampung Bonglai

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengembangan perlindungan sosial, pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berjuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan demi terciptanya kesejahteraan. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat (1) : “ Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya”.¹

Program keluarga harapan ini memfokuskan dua komponen yaitu pendidikan (meningkatkan taraf pendidikan anak RTM) dan kesehatan (meningkatkan status kesehatan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita) penyandang disabilitas berat dan lansia diatas 70 tahun. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Menurut teori *human capital* kualitas sumber daya manusia selain ditentukan oleh kesehatan juga ditentukan oleh pendidikan. Jadi, apabila kualitas sumberdaya manusia rendah dari pendidikan dan kesehatan tidak menutup kemungkinan akan memicu kemiskinan. Oleh karena itu, hadirnya

¹ Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Pasal 1 ayat 1

PKH ini mencoba untuk membantu keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidup serta mampu memutus rantai kemiskinan.

Pada pelaksanaannya PKH di Kampung Bonglai baru terlaksana pada tahun 2014 untuk wilayah Way Kanan, yang mana Kampung Bonglai merupakan bagian dari Kabupaten Way Kanan. Pada setiap kelurahan memiliki satu pendamping PKH untuk terlaksananya PKH dengan baik. Dalam hal ini untuk tercapainya kesuksesan PKH disuatu daerah harus memenuhi indikator efektivitas tercapainya PKH, berikut ini peneliti akan menguraikan hasil temuan lapangan efektivitas PKH berdasarkan pengukuran pada lima indikator efektivitas PKH sebagai berikut :

1. Indikator *masukan* (Tersedianya dana, Pedoman Umum, Alat Sosialisasi, Penetapan RTM)

Berdasarkan dari data sekunder yang telah dihimpun oleh penulis diketahui bahwa tingkat kebutuhan rata-rata sebagian masyarakat Kampung Bonglai adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pola Konsumsi Masyarakat Kampung Bonglai

No.	Pola Konsumsi	Jumlah Pengeluaran (perbulan)
1	Kebutuhan Pangan/Makanan	Rp. 700.000
2	Kebutuhan Sandang/Pakaian	Rp. 300.000
3	Biaya Pendidikan	Rp. 500.000
4	Biaya Kesehatan	Rp. 250. 000
5	Pengeluaran Lain (Listrik, air dll)	Rp. 200.000

Sumber: Hasil wawancara Staf Kantor Kelurahan Kampung Bonglai²

² Wawancara Bapak Nursata, Sekretaris Kampung Bonglai, pada (Jum'at, 14 April 2017 Pukul 09:30 WIB)

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pangan Rp.700.000,³ pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp. 250.000 tidak sebanding dengan tingkat pendapatan masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani dengan pendapatan rata-rata perbulan yang hanya mencapai Rp. 500.000-Rp1.000.000,⁴ hal ini membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat Kampung Bonglai adalah masyarakat miskin, dimana jumlah pendapatan yang mereka miliki tidak dapat mencukupi tingkat kebutuhan ekonomi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dan jawaban kuesioner pada peserta PKH yang dinyatakan tidak mampu/miskin ditemukan 5 dari 70 responden sudah beralih status menjadi keluarga sejahtera. Peralihan status RTM ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan pada keluarga tersebut sehingga mampu mencukupi kebutuhannya terutama kebutuhan pangan, pendidikan dan kesehatan. Peralihan status ini dibuktikan dengan perubahan kondisi tempat tinggal yang telah berubah menjadi rumah permanen, serta tercukupinya kebutuhan dasar, kebutuhan pendidikan serta kesehatan.

Sedangkan yang disebut keluarga miskin menurut BPS adalah sebagai berikut:

³ Berdasarkan hasil penelitian kebutuhan masyarakat Kampung Bonglai terutama yang tergolong dalam keluarga miskin kebutuhan perbulannya tidak mencapai Rp.700.000 tetapi kebutuhan masyarakat Kampung Bonglai hanya mencapai Rp.300.000-Rp.000 per bulan. Hal ini dikarenakan banyak dari kebutuhan pangan yang dibutuhkan masyarakat seperti sayur dan beras dan terpenuhi oleh mereka sendiri tanpa harus membelinya.

⁴ Berdasarkan hasil penelitian mayoritas masyarakat Kampung Bonglai berpenghasilan antara Rp.500.000 dan kurang dari Rp.1.000.000

- a. luas bangunan per anggota rumah tangga /keluarga kurang dari 8 M².
- b. Lantai rumah berupa tanah/papan dengan kualitas rendah.
- c. Dinding rumah berupa bambu/papan dengan kualitas rendah.
- d. Fasilitas MCK belum tersedia.
- e. Sumber air minum bukan air minum bersih.
- f. Sumber penerangan yang digunakan bukan listrik.
- g. Jenis bahan bakar untuk memasak adalah kayu/arang.
- h. Frekuensi makan dalam sehari kurang dari 2 kali.
- i. Tidak mampu membeli daging /susu/ayam dalam seminggu.
- j. Tidak memiliki kemampuan membeli baju baru setiap anggota rumah tangga.
- k. Tidak memiliki kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik.
- l. Lapangan pekerjaan berupa petani, nelayan, atau pekebun.
- m. Pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat SD/tidak sekolah.
- n. Tidak memiliki asset/barang berharga minimal Rp. 500.000.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi, maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin atau tidak sejahtera.⁵ Berdasarkan tolak ukur keluarga miskin menurut BPS, di Kampung Bonglai ditemukan peserta PKH yang tidak termasuk dalam keluarga miskin seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini:

⁵ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kemiskinan*, (On-line) tersedia di: www.bps.go.id, diakses pada (Jum'at 12 Mei 2017 Pukul 20:25 WIB)

Tabel 4.2
Peserta PKH yang Tidak Termasuk Keluarga Miskin

No.	Nama Peserta	Kriteria Sejahtera yang terpenuhi
1.	Maemunah	Luas bangunan lebih dari 8m ² , lantai rumah keramik, dinding permanen, tersedia fasilitas MCK, memiliki sumber air bersih, sumber penerangan menggunakan listrik, memasak dengan kompor gas, pekerjaan pedagang, memiliki aset tetap (kebun dan 3kendaraan bermotor)
2.	Kartika	Luas bangunan lebih dari 8m ² , lantai rumah keramik, dinding permanen, tersedia fasilitas MCK, memiliki sumber air bersih, sumber penerangan menggunakan listrik, memasak dengan kompor gas, pekerjaan pedagang, memiliki aset tetap (kebun)
3.	Nurasiah	Luas bangunan lebih dari 8m ² , lantai rumah keramik, dinding permanen, tersedia fasilitas MCK, memiliki sumber air bersih, sumber penerangan menggunakan listrik, memasak dengan kompor gas, pekerjaan pedagang, memiliki aset tetap (kebun) dan penghasilan lebih dari Rp. 1.000.000
4.	Nirwana	Luas bangunan lebih dari 8m ² , lantai rumah keramik, dinding permanen, tersedia fasilitas MCK, memiliki sumber air bersih, sumber penerangan menggunakan listrik, memasak dengan kompor gas, pekerjaan distributor gula merah, memiliki aset tetap (kebun)
5.	Sanah	Luas bangunan lebih dari 8m ² , lantai rumah keramik, dinding permanen, tersedia fasilitas MCK, memiliki sumber air bersih, sumber penerangan menggunakan listrik, memasak dengan kompor gas, pekerjaan petani, memiliki aset tetap (kebun karet)

Sumber : Data diolah berdasarkan hasil observasi, wawancara dan angket pada peserta PKH Kampung Bonglai tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kelima peserta PKH tersebut sudah dapat dikatakan dalam keluarga sejahtera yang seharusnya tidak lagi mendapat bantuan PKH. Karena pada dasarnya kebutuhan dasar, kesehatan serta pendidikan sudah mampu terpenuhi sendiri.

Tidak efektifnya penetapan RTM penerima bantuan ini dikarenakan data yang digunakan untuk penetapan penerima bantuan ditentukan dengan data ditingkat nasional dengan menggunakan data pada tahun sebelumnya/ data yang digunakan tidak valid, sedangkan ketika ada peralihan status pada RTM di daerah harus melalui proses panjang agar bisa digantikan atau dihapus dari daftar penerima bantuan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan pedoman umum PKH serta menjadikan penetapan RTM penerima bantuan kurang tepat sasaran. Melihat dari kondisi ini menunjukkan bahwa penetapan peserta PKH di Kampung Bonglai belum tepat sasaran, selain adanya peserta yang beralih status menjadi keluarga sejahtera ditemukan pula peserta yang berasal dari keluarga sejahtera yang merupakan kerabat-kerabat dekat dari pejabat aparat desa.⁶ Hal ini jelas membuktikan masih dijunjungnya budaya nepotisme.

2. Indikator *Proses* (Tindak lanjut dari penetapan RTM yaitu verifikasi data, pelaksanaan sosialisasi)

Verifikasi data dilakukan dengan cara RTM menunjukkan kartu anggota serta dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan seperti (KTP, KK, ASKES, absensi kehadiran siswa dan lain-lain). Berdasarkan hasil jawaban kuesioner, 70 responden mengatakan bahwa verifikasi data dengan syarat mengumpulkan sejumlah data-data ini tidak memberatkan peserta sehingga

⁶ Berdasarkan hasil penelitian berikut ini adalah peserta yang merupakan kerabat dari pejabat desa (Maemunah, Kartika, Nurasiah, Nirwana dan Sanah) kelima peserta tersebut sudah tergolong dalam keluarga sejahtera yang mendapat bantuan sejak tahap pertama.

dapat berjalan dengan efektif. Setelah dilakukannya verifikasi data maka tahap lanjut adalah sosialisasi dimana verifikasi data dan sosialisasi dilakukan pada hari yang sama. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara memberikan pengertian tentang tujuan, hak dan kewajiban, sanksi, pengaduan dan lain sebagainya serta mulai dilakukannya pendampingan oleh petugas kepada anggota PKH. Dari hasil kuesioner yang di dapat bahwa dari 70 responden hanya 58 responden yang menjawab mengerti dan memahami tujuan, hak dan kewajiban pada PKH dan 12 lainnya tidak memahami. Dari hasil penelitian lapangan ditemukan keterangan bahwa responden yang tidak memahami pada saat pelaksanaan sosialisasi PKH secara keseluruhan dikarenakan latar belakang pendidikan responden yang sebagian adalah tidak tamat Sekolah Dasar (SD), serta faktor usia yang sudah tidak muda lagi sehingga responden ini kurang tanggap terhadap apa yang disampaikan oleh pendamping PKH.⁷ Dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Tidak tamat SD sebanyak 10 peserta
- 2). Lansia sebanyak 2 peserta

Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan kurang efektif.

3. Indikator *Keluaran* (Setelah sosialisasi RTM mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai peserta serta mulai dilakukannya penyaluran dana kepada peserta PKH).

⁷ Berikut ini peserta yang tidak tamat SD (Islamiyah, Marsiah, Sumyati, Asaro, Poniye, Kasniah, Siti Samsiah, Jamsiah, Jubaedah, Titin Sumanti) peserta lansia (Sartini, Jawariyah)

Pada tahap penyaluran dana dibutuhkan ketepatan waktu dan ketepatan jumlah. Berdasarkan hasil kuesioner pada 70 responden 100% peserta PKH menjawab “iya” untuk ketepatan waktu dan ketepatan jumlah pada tahap penyaluran dana. Tahap penyalurannya pun dilakukan sesuai dengan pedoman umum. Tidak terdapat pemotongan dana oleh pihak-pihak tertentu sehingga proses penyaluran dana PKH dikampung Bonglai sudah dilakukan dengan efektif. Adapun pengurangan jumlah dana/uang yang diterima oleh sebagian peserta adalah untuk pemotongan biaya transportasi, dikarenakan lokasi kantor POS berada dikecamatan jauh dari Kampung Bonglai sedang mereka tidak memiliki kendaraan yang memadai untuk sampai di kantor POS sehingga harus menyewa kendaraan.⁸

4. Indikator *Manfaat* (Dana yang diterima diperuntukkan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan).

Berdasarkan hasil kuesioner pada 70 responden dilapangan menunjukkan 40 responden atau 57% responden menyatakan bahwa dana PKH yang mereka terima selain digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan dana PKH juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok (biaya hidup sehari-hari), berdasarkan hasil wawancara hal ini dikarenakan pendapatan RTM yang sangat rendah sehingga para RTM kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan harus memanfaatkan dana PKH untuk

⁸ Untuk menuju kantor POS para peserta terpaksa harus menyewa alat transportasi dengan biaya sebesar Rp. 35.000-Rp.50.000 per orang (pulang pergi).

membantu memenuhi kebutuhan selain pendidikan dan kesehatan. 40 responden ini menyatakan bahwa mereka terpaksa menggunakan sebagian dana PKH untuk kebutuhan lainnya karena minimnya pendapatan yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengalokasian dana PKH oleh peserta kurang tepat sehingga manfaatnya terhadap pendidikan dan kesehatan kurang efektif.

5. Indikator *Dampak* (Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan)

Berdasarkan hasil kuesioner dilapangan menunjukkan bahwa 100% peserta PKH menyatakan bahwa adanya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan setelah mereka terdaftar sebagai peserta PKH (meskipun banyak penyalahgunaan dan PKH oleh peserta PKH). Hal ini dibenarkan oleh pendamping PKH Kampung Bonglai, beliau mengatakan bahwa sejak diberlakukannya PKH hampir seluruh anak yang dalam masa pendidikan dan mendapat bantuan PKH mereka memenuhi kewajiban mereka yakni mengikuti kehadiran dikelas minimal 85% dari hari belajar aktif. Selain itu tingkat kehadiran ibu hamil dan balita dalam memerikasakan kesehatannya juga meningkat. PKH sangat membantu kesulitan masyarakat terutama di Kampung Bonglai, dari 70 responden dalam penelitian semuanya ingin agar PKH tetap dilanjutkan karena program ini sangat membantu masyarakat dalam membantu mereka mengantarkan anak-anaknya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mampu membantu mencukupi kebutuhan

kesehatan bagi ibu hamil dan balita. Walaupun bagi sebagian peserta dana PKH yang mereka terima masih sangat minim sehingga mereka harus tetap bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan 5 indikator diatas bahwasanya pelaksanaan PKH di Kampung Bonglai dapat diartikan belum terlaksana dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasanya dari kelima indikator efektifitas PKH hanya dua indikator saja yang mampu terpenuhi dengan baik yaitu pada indikator manfaat dan dampak. Sedangkan indikator proses, masukan dan keluaran masih belum efektif. Berdasarkan analisis diatas dapat diketahui bahwa pengentasan kemiskinan di Kampung Bonglai melalui PKH belum efektif, pernyataan ini juga didukung oleh meningkatnya jumlah penerima PKH yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Jumlah Penerima PKH Kampung Bonglai

No.	Peserta PKH	Jumlah RTM
1	Peserta PKH tahap I Tahun 2014	70 RTM
2	Peserta PKH tahap II Tahun 2017	75 RTM
Total		145 RTM

Sumber: Dokumentasi Kampung Bonglai tahun 2017⁹

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa penerima PKH mengalami peningkatan, jika pada tahap I hanya 70 anggota tahap II ada penambahan anggota sebanyak 75 orang dengan jumlah keseluruhan adalah 145 anggota, penambahan anggota tersebut tidak disertai pengurangan anggota yang sudah

⁹ Dokumentasi Kampung Bonglai tahun 2014

dikatakan sejahtera, artinya PKH selama 4 tahun berjalan baru mampu meningkatkan partisipasi pendidikan dan kesehatan peserta. Selama 4 tahun berjalan belum mampu mengcover seluruh keluarga miskin yang ada di Kampung Bonglai. Terlebih lagi stimulus dana PKH alokasinya hanya digunakan untuk pendidikan dan kesehatan bukan digunakan untuk modal usaha, sehingga PKH hanya mampu mengurangi beban pendidikan dan kesehatan RTM. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan membutuhkan modal/lapangan pekerjaan untuk dapat meningkatkan pendapatan. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa PKH belum mampu menekan/mengentaskan tingkat kemiskinan di Kampung Bonglai.

Pengentasan kemiskinan yang dilakukan di Kampung Bonglai melalui PKH memberikan manfaat yang sangat berarti bagi masyarakat tetapi seiring berjalannya program PKH di Kampung Bonglai belum mampu memutus mata rantai kemiskinan yang ada dimasyarakat. Hanya saja PKH memberi sisi positif pada meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu menekan tingginya tingkat kemiskinan di Kampung Bonglai.¹⁰

¹⁰ Dari 900KK yang dinyatakan miskin baru tercover 145 peserta (keluarga), jelas sekali bahwa masih banyak sekali keluarga miskin di Kampung Bonglai yang masih memerlukan bantuan pemerintah.

B. Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Ekonomi Islam

Jaminan Sosial merupakan hak asasi manusia, berlaku universal untuk seluruh warga negara, yang bermanfaat untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap ketidakmampuan penduduk miskin dalam menghadapi risiko sosial. Jaminan Kesejahteraan Sosial telah menjadi komitmen nasional yang diamanatkan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam paradigma Islam pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, Pemerintah berkewajiban melindungi fakir miskin yang berada di daerah kekuasaannya dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan hidup mereka. Mencukupi kebutuhan setiap warga negara melalui sumber-sumber dana yang sah yang diaplikasikan dalam bentuk perlindungan sosial. Islam menilai kemiskinan sebagai bencana dan musibah yang harus di tanggulangi, diantara cara yang ditetapkan oleh Islam dalam menanggulangi kemiskinan adalah himbauan bekerja dan sederhana dalam pembelanjaan. Bahkan menetapkan hak-hak bagi fakir miskin dalam harta orang kaya, seperti zakat, shadaqah sunnah, dan lain-lain yang termasuk dalam kategori pembentukan jaminan sosial. Tanggung jawab pemerintah Indonesia pada rakyatnya tercermin pada diberlakukannya perlindungan sosial dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di negara ini. Program terbaru perlindungan sosial dalam pengentasan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang mulai diberlakukan sejak tahun 2007. PKH yang merupakan program perlindungan sosial yang memberikan jaminan

kesehatan dan pendidikan bagi para peserta penerima bantuan secara tunai namun dengan syarat tertentu sesuai dengan ketentuan pedoman umum PKH.

Dalam Islam mengentaskan kemiskinan dan agar terwujudnya kesejahteraan, program perlindungan sosial haruslah berlandaskan pada keadilan, tanggung jawab, kebaikan dan jauh dari segala kedzoliman dan arogansi. Dalam implementasinya PKH dalam mengentaskan kemiskinan dilihat dari sudut pandang nilai-nilai dasar Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Keadilan

Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia supaya berperilaku adil, baik kepada Allah SWT, dirinya sendiri maupun orang lain. Pada penelitian ini PKH di Kampung Bonglai belum menjunjung tinggi nilai keadilan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penentuan RTM dikampung Bonglai masih menjunjung tinggi budaya nepotisme.¹¹

Keadilan adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran. Seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT Qs. An-Nahl ayat 90:

¹¹ Berdasarkan hasil penelitian berikut ini adalah peserta yang merupakan kerabat dari pejabat desa (Maemunah, Kartika, Nurasiah, Nirwana dan Sanah) kelima peserta tersebut sudah tergolong dalam keluarga sejahtera yang mendapat bantuan sejak tahap pertama

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya :*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*¹²

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat An-Nahl ayat 90 menjelaskan bahwa:

Allah SWT menyebutkan bahwa Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berlaku adil, yakni pertengahan dan seimbang dan Allah memerintahkan untuk berbuat kebajikan. Sufyan Ibnu Uyaynah, mengatakan bahwa istilah adil dalam ayat ini ialah sikap pertengahan antara lahir dan batin bagi setiap orang yang mengamalkan suatu amal karena Allah SWT.

Pada surat An-Nahl ayat 90 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa Allah SWT sangat menekankan kita selaku umat manusia berperilaku adil, termasuk adil dalam perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Keadilan dalam perlindungan sosial ini bertujuan agar distribusi kekayaan dapat merata sehingga tidak ada jurang pemisah antara sikaya dan simiskin. PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat yang merupakan bentuk tanggung jawab serta kepedulian pemerintah dimana dalam implementasinya PKH di

¹² Departemen Agama RI, *Op. Cit.* hlm. 385

Kampung Bonglai termasuk kurang tepat sasaran dalam menentukan peserta penerima bantuan, sehingga yang mendapat bantuan PKH bukan sepenuhnya kaum miskin melainkan orang yang mampu/kaya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan belum sepenuhnya diterapkan pada program PKH, terutama di Kampung Bonglai. Jadi implementasi PKH di Kampung Bonglai dalam perspektif Ekonomi Islam dalam mengentaskan kemiskinan kurang efektif karna belum memenuhi nilai keadilan.

2. Tanggung Jawab

Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Tidak terkecuali pemerintah yang memiliki kekuasaan atas wilayah yang ia pimpin. Maka hendaklah seorang pemimpin harus berusaha memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Muddatsir ayat 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya :Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya¹³

Dalam tafsir Ibnu Katsir Qs. Al-Muddatsir ayat 38 menjelaskan bahwa: Allah SWT memberitahukan bahwa :”tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. Yakni bergantung kepada amal

¹³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* hlm. 575

perbuatannya sendiri kelak dihari kiamat, demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya.

Pada surat Al-Muddatsir ayat 38 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa setiap diri memiliki tanggung jawab terlenih kepada pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat dan negara yang di pimpinnya. Seorang pemimpin haruslah mampu bersikap amanah demi tercapainya kesejahteraan karena setiap apa yang diamanahkan kepada seorang pemimpin akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.

Dalam implemantasinya PKH di Kampung Bonglai belum ada tanggung jawab secara penuh dalam mewujudkan kemaslahatan pada program ini, RTM penerima bantuan ditentukan berdasarkan data-data lama tanpa adanya pembaharuan terlebih dahulu, sehingga terdapat masyarakat yang sudah beralih status sosialnya namun masih saja mendapat bantuan PKH karena di dalam data pemerintah masih tergolong sebagai keluarga miskin sedangkan masyarakat yang benar-benar miskin tidak termasuk kedalam peserta penerima bantuan dengan alasan belum terdata dan akan mendapat bantuan berikutnya. Jadi dalam hal ini pengimplementasian PKH belum terealisasi dengan baik karna belum adanya tanggung jawab secara penuh para petugas/pengelola program terhadap masyarakat.

3. *Takaful* (Jaminan Sosial)

Jaminan sosial dalam Islam merupakan *huquq Allah*, atau sebuah kewajiban yang telah disyariatkan oleh Allah kepada setiap orang yang memiliki kelebihan harta, untuk menafkahkan hartanya kepada yang kurang mampu. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Qs. An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.¹⁴

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat An-Nisa ayat 9 menjelaskan bahwa : Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang menjelang ajalnya, lalu kedengaran oleh seorang lelaki bahwadia mengucapkan suatu wasiat yang menimbulkan mudarat pada ahli warisnya. Maka Allah SWT memerintahkan kepada orang yang mendengar wasiat tersebut. Hendaknya ia bertaqwa kepada Allah, membimbing si sakit serta meluruskan kejalan yang benar. Hendaknya si sakit memandang kepada keadaan para ahli warisnya. Sebagaimana diwajibkan baginya berbuat

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* Hlm. 78

sesuatu untuk ahli warisnya, bila dikhawatirkan mereka akan terlunta-lunta.

Pada surat An-Nisa ayat 9 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa Islam tidak memperbolehkan terhadap seorang muslim membiarkan muslim lainnya dalam keadaan kelaparan/kekurangan. Adanya jaminan sosial yang diberikan pemerintah haruslah menyeluruh demi terciptanya kesejahteraan, mendorong terciptanya hubungan baik antar individu, masyarakat dan pemerintah. Jaminan sosial juga menghilangkan jarak pemisah antara kaya dan miskin sehingga dengan adanya perlindungan sosial masyarakat miskin mampu memenuhi kehidupannya dengan layak serta mempererat hubungan sesama muslim. Seperti halnya PKH dikampung bonglai yang memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat miskin, sehingga mereka mampu mengakses pendidikan dan kesehatan dengan mudah dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan analisis pada kondisi diatas bahwasanya implementasi PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Kampung Bonglai di lihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam kurang dalam berlaku adil dan bertanggung jawab, PKH hanya sebagai bentuk jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat agar terciptanya hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat. Karena masih banyak ditemukan

ketidaktepatan sasaran dalam menentukan anggota penerima bantuan dan tidak tepat gunanya dana yang diterima anggota sehingga manfaat dari PKH dapat dikatakan tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran (kurang efektif).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan, maka penelitian mengenai Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Study pada peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan berupa uang tunai kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai *Conditional Cash Transfer* (CCT). Tujuan PKH dalam jangka panjang adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Tujuan tersebut sekaligus mendukung dalam upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MGDs).
2. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kampung Bonglai. PKH di Kampung Bonglai yang dimulai sejak tahun 2014-2017 yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah di Kampung Bonglai kurang terlaksana secara efektif.

Belum efektifnya program ini dikarenakan masih ditemukan kurang tepat sasaran dalam penentuan peserta PKH selain itu kurang efektifnya pengalokasian dana PKH oleh peserta membuat PKH menjadi tidak tepat guna dan tidak sesuai dengan tujuan program PKH, sehingga PKH belum dapat mengurangi/mengentaskan kemiskinan yang ada di Kampung Bonglai.

3. Program Keluarga Harapan (PKH) menurut perspektif Ekonomi Islam.

Dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung jawab dan *takaful*, dalam implementasinya PKH masih sebatas bentuk jaminan sosial pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat, sedangkan nilai keadilan dan tanggung jawab kurang terlaksana dengan baik karena masih ditemukannya ketidaktepatan sasaran dalam menentukan anggota penerima bantuan oleh petugas PKH di Kampung Bonglai.

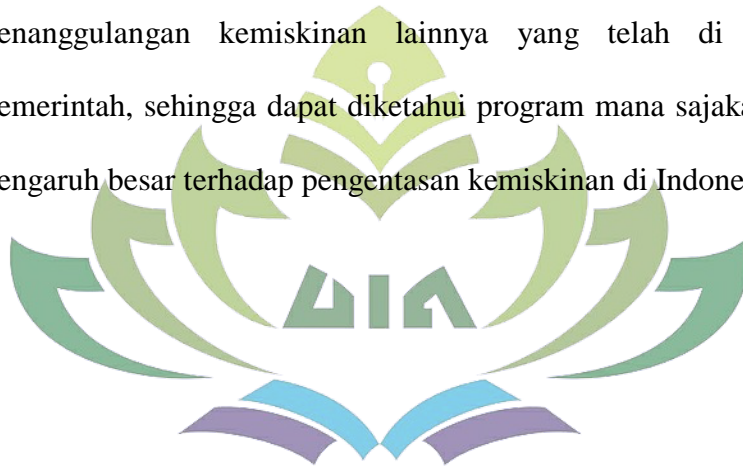
B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Program keluarga harapan perlu di evaluasi dan monitoring lebih baik lagi, melakukan sosialisasi baik secara nasional terlebih di daerah pedalaman secara terarah untuk memberikan kesadaran dan pemahaman yang benar mengenai program ini kepada semua pemangku kepentingan, baik aparat pelaksana maupun masyarakat. Kegiatan sosialisasi tersebut harus diatur

secara tegas terarah dan sesuai dengan pedum. Dan dalam penentuan RTM penerima bantuan diharapkan menggunakan data yang valid agar lebih tepat sasaran.

2. Bagi Petugas PKH/pendamping PKH harus lebih mengarahkan kepada kedepannya agar lebih memfokuskan pada proses penyadaran RTM agar tidak ada lagi ketergantungan terhadap bantuan-bantuan pemerintah.
3. Penelitian Selanjutnya, perlu diteliti efektivitas beberapa program penanggulangan kemiskinan lainnya yang telah di implementasikan pemerintah, sehingga dapat diketahui program mana sajakah yang memiliki pengaruh besar terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Keempat*, Jakarta: PT Grafindo Husada, 2008.
- Arsyad, Lincolyn, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2010.
- Badrudin, Rudy, *Ekonomi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2012.
- Basri, Faisal, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2005.
- Bukhari, *Shahih Bukhari dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah*, Versi 2.09.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponogoro, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Madkur 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Tiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: Cipta Aditia Mukti 2004.
- Kaelan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: YKPN 2002

Lestari Rahayu, Sri, *Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Kedepan*. Bandung:

Fokus Media, 2012.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara, 2003.

Muslim, *Shahih Muslim dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah*, Versi 2.09.

P. Todaro, Michael dan C. Smith, Sthepan, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelpan*, Jakarta: Erlangga, 2003.

Rochaety, Eti dan Tresnati, Ratih, *Kamus Istilah Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Soeratno dan Arsyad, Lincolyn, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi Lima*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Syauqi Beik, Irfan dan Dwi Arsyianti, Laily *Ekonomi Pembngunan Syariah, Edisi Revisi*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2016.

Tika, Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir Al-Thabrani dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah*, Versi 2.09.

Wawancara Ibu Azizah, Ketua Bagian Sosial Kecamatan Banjit pada (Selasa, 27 Desember 2016 Pukul 10:00 WIB).

Wawancara Ibu Jarsiti, Peserta PKH Kampung Bonglai Kecamatan Banjit Pada (Rabu, 28 Desember 2016 Pukul 15:00 WIB).

Wawancara Ibu Juliyanah, Peserta PKH Kampung Bonglai Kecamatan Banjit pada
(Rabu, 28 Desember 2016 Pukul 15:00 WIB).

Wawancara Bapak Khutbi, Kaur Pemerintahan Desa Bonglai Kecamatan Banjit
Kabupaten Way Kanan (Kamis, 30 Maret 2017, Pukul 14:30 WIB).

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi*.
Malang: Rineka Cipta, 2005.

JURNAL

Mahaeni, Aain, et. al. *Evaluasi Program-Program Pengentasan Kemiskinan di
Provinsi Bali*, Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Vol. X No. 1:8-18 (4 Juli 2014)

Suryawati, Chriswardini, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, Jurnal
Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 08/No.03/September/2005.

Ahmadi, Rulan, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Pendekatan Modal Manusia
(Studi Layanan Publik Tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang
Diselenggarakan Oleh BPM-KB dan Posko 100 di Kota Surabaya)*, Jurnal
Administrasi Publik Vol. 10, No. 2 (Desember 2012)

WEB

BPS. *Jumlah Penduduk Miskin*. (On-Line) tersedia di <http://www.bps.go.id> (diakses, 05 Desember 2016)

Kementrian Sosial, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*, (On-line) tersedia di <https://www.kemsos.go.id/unduh/UU-kesos-No112009.pdf> (diakses, 7 Maret 2017)

TNP2K. “Program Keluarga Harapan” (On-liine) tersedia di: <http://www.tnp2k.go.id> (diakses 30 November 2016)





Lampiran-Lampiran

**FORM KONTROL KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH
PENYALURAN TAHAP 4 TAHUN 2014**

Kecamatan :Banjit
Kelurahan/Desa :Bonglai
Nama Pendamping :Meji Satria

No	No Peserta	Nama Pengurus	Alamat	Total Terima	Total Pengurangan	Alokasi Pembayaran	Pengambilan*	Tanda Tangan/ Cap Jemol	Ket
1	180701016 000022	JAWARIAH	Wonorejo	225,000	0	225,000	225,000		
2	180701016 000023	SAMSU	Sinar Baru	162,500	0	162,500	162,500		
3	180701016 000024	SANAH	Bonglai	387,000	0	387,000	387,000		
4	180701016 000025	PURNAMA	Marga Laksana	325,000	0	325,000	325,000		
5	180701016 000027	ARNI	Marga Laksana	225,000	0	225,000	225,000		
6	180701016 000223	MAIMUNAH	Sinar Harapan	225,000	0	225,000	225,000		
7	180701016 000224	JUNARIAH	Sinar Harapan	262,500	0	262,500	262,000		
8	180701016 000225	SARTINI	Bonglai	162,500	0	162,500	162,500		
9	180701016 000405	SAMINAH	Bonglai	162,500	0	162,500	162,500		
10	180701016 000407	NURASIAH	Talang Jerai	283,333	0	283,333	283,333		

11	180701016 000616	MARSIAH	Jaya Laksana	225,000	0	225,000	225,000		
12	180701016 000617	ANISA	Bonglai	162,500	0	162,500	162,500		
13	180701016 000618	NURHADIY ATI	Bukit Tinggi	325,000	0	325,000	325,000		
14	180701016 000619	AMI	Bonglai	262,500	0	262,500	262,000		
15	180701016 000620	NIRWANA	Gajah Mati	187,500	0	187,500	187,000		
16	180701016 000622	KAMSIAH	Mekar Laksana	287,500	0	287,500	287,500		
17	180701016 000623	SARMANA H	Sinar baru	283,333	0	283,333	283,333		
18	180701016 000624	UMIYANAH	Sinar Baru	262,500	0	262,500	262,500		
19	180701016 000812	KARNITI	Sinar Baru	187,500	0	187,500	187,500		
20	180701016 000813	ASNATI	Sinar Harapan	420,833	0	420,833	420,833		
21	180701016 000814	SUKAMTI	Wonosari	262,500	0	262,500	262,500		
22	180701016 000815	SANAH	Marga Laksana	187,500	0	187,500	187,500		
23	180701016 000817	SAENI	Bonglai	262,500	0	262,500	262,500		
24	180701016 000818	ROHANIAH	Jaya Laksana	283,333	0	283,333	283,333		

25	180701016 000819	NURSADA H	Mekar Laksana	325,000	0	325,000	325,000		
26	180701016 001003	ATMAH	Gajah Mati	225,000	0	225,000	225,000		
27	180701016 001004	JUMAINAH	Wonosari	187,500	0	187,500	187,500		
28	180701016 001005	ATI AWIAH	Bonglai	370,833	0	370,833	370,833		
29	180701016 001006	UMI SLAMAH	Talang Tempel	370,833	0	370,833	370,833		
30	180701016 001203	ASNI	Jaya Laksana	308,333	0	308,333	308,333		
31	180701016 001204	SARINAH	Jaya Laksana	225,500	0	308,333	308,333		
32	180701016 001206	SARAH	Wonosari	245,833	0	245,833	245,833		
33	180701016 001403	SRI WAHYUNI	Sinar Baru	225,000	0	225,000	225,000		
34	180701016 001404	UMAYA	Wonosari	262,500	0	262,500	262,500		
35	180701016 001405	PENI	Gajah Mati	325,000	0	325,000	325,000		
36	180701016 001406	SARMAH	Sinar Baru	287,500	0	287,500	287,500		
37	180701016 001604	SARIYAH	Bonglai	225,500	0	225,500	225,500		
38	180701016 001605	KARTIKA	Marga Laksana	162,500	0	162,500	162,500		

39	180701016 001606	SARIAH	Jaya Laksana	283,333	0	283,333	283,333		
40	180701016 001607	RUBIAH	Jaya Laksana	225,500	0	225,500	225,500		
41	180701016 001608	TITIN SUMANTI	Jaya Laksana	225,500	0	225,500	225,500		
42	180701016 001609	ARCA	Marga Laksana	187,500	0	187,500	187,500		
43	180701016 001610	SARNITIK	Mekar Laksana	187,500	0	187,500	187,500		
44	180701016 001797	JULYANAH	Mekar Laksana	162,500	0	162,500	162,500		
45	180701016 001798	ISLAMIAH	Jaya Laksana	287,500	0	287,500	287,500		
46	180701016 001799	AAM AMELIA	Talang Tempel	308,333	0	308,333	308,333		
47	180701016 001800	PONIYEM	Talang Tempel	262,500	0	262,500	262,500		
48	180701016 001801	ASARO	Mekar Laksana	325,000	0	325,000	325,000		
49	180701016 001802	TINAH	Talang Jerai	225,000	0	225,000	225,000		
50	180701016 002001	RUNIAH	Sinar Harapan	162,500	0	162,500	162,500		
51	180701016 002002	MASNAH	Sinar Harapan	187,500	0	187,500	187,500		
52	180701016 002004	RANTI	Bukit Tinggi	308,333	0	308,333	308,333		

53	180701016 002194	JARSITI	Wonorejo	187,500	0	187,500	187,500		
54	180701016 002195	AMIMAH	Mekar Laksana	225,000	0	225,000	225,000		
55	180701016 002196	RUMSIAH	Talang Jerai	370,833	0	370,833	370,833		
56	180701016 002396	SURNI	Wonorejo	387,000	0	387,000	387,000		
57	180701016 002397	SANI	Wonorejo	162,500	0	162,500	162,500		
58	180701016 002398	JUBAEDAH	Sinar Harapan	325,000	0	325,000	325,000		
59	180701016 002400	BAINAH	Bukit Tinggi	187,500	0	187,500	187,500		
60	180701016 002401	SUKANAH	Wonosari	225,000	0	225,000	225,000		
61	180701016 002595	SITI SAMSIAH	Gajah Mati	162,500	0	162,500	162,500		
62	180701016 002596	JAMSIAH	Bukit Tinggi	370,833	0	370,833	370,833		
63	180701016 002597	MISNAWAT I	Bonglai	162,500	0	162,500	162,500		
64	180701016 002599	MURSIAH	Bonglai	387,000	0	387,000	387,000		
65	180701016 002600	KASNIAH	Talang Tempel	262,500	0	262,500	262,500		
66	180701016 002601	JANAWIYA H	Bonglai	187,500	0	187,500	187,500		

67	180701016 002603	KOMALA	Gajah Mati	187,500	0	187,500	187,500		
68	180701016 002788	ARINI	Mekar Laksana	162,500	0	162,500	162,500		
69	180701016 002789	SARNITI	Talang Jerai	225,000	0	225,000	225,000		
70	180701016 002791	SUMYATI	Talang Jerai	387,000	0	387,000	387,000		

Mengetahui,
Camat Banjit



Banjit, 04 November 2017
Pendamping PKH Kampung Bonglai

Taufik H, S.STP.M.SI
NIP.198109262001121001

MEJI SATRIA